



FROM MINUS TO PLUS

Cerita Lembaga Sosial Desa (LSD)
dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia
di Kabupaten Lombok Timur



LEARN BASED PROJECT LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD)
LEMBAGA ADVOKASI BURUH MIGRAN INDONESIA (ADBMI)

FROM MINUS TO PLUS

FROM MINUS TO PLUS

**CERITA LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD)
DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)

FROM MINUS TO PLUS

*Cerita Lembaga Sosial Desa (LSD)
dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia
di Kabupaten Lombok Timur*

Penyunting

Roma Hidayat
Fatih Kudus Jaelani

Penulis

Roma Hidayat
Firman Siddik
Fauzan
Rasyid Ridho
Widya Kuswatun Harwin

Perwajahan Sampul dan Isi

Parlan Tjak

Foto

Tim ADBMI

Diterbitkan oleh

ADBMI

Cetakan Pertama, Januari 2024

122 hlm.; 14 cm x 20 cm

QRCBN: 62-3080-8304-190

Dilarang menggandakan sebagian atau keseluruhan
buku ini kecuali demi kepentingan non-komersial.

PRODUKSI BUKU INI DIDUKUNG OLEH
AWO INTERNASIONAL. SELURUH ISI
MENJADI TANGGUNG JAWAB ADBMI.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	7
Sebuah Pengantar :	
Metamorfosis LSD: Mengukir Perubahan dan Keberdayaan Pekerja Migran	9
PROLOG	
Cerita Kelam Pekerja Migran di Gumi Patuh Karya	15
Lingkaran Persoalan Pekerja Migran	23
Melahirkan Lembaga Sosial Desa (LSD)	29
MINUS	
Lima Desa Program	37
Cerita Para Pendamping LSD	51
TO	
Beda Desa, Beda Cara	65
Solusi Terkunci Kepentingan	73
Merintis LSD	77
Kenapa LSD?	79
Membangun Kekuatan LSD	81
PLUS	
Potret Perubahan LSD	95
Kemenangan-kemenangan Advokasi	109
Potret Keberhasilan Advokasi	115

Sebuah Pengantar

METAMORFOSIS LSD: MENGUKIR PERUBAHAN DAN KEBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN



Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (Quran, 12:55).

ADEGAN MENCENGANGKAN itu direkam Al Qur'an ketika Yusuf yang saat itu masih berstatus narapidana—untuk sebuah kejahatan yang tidak pernah ia lakukan—mengajukan permintaan jabatan prestisius kepada raja Mesir.

Sangat mengagumkan. Mengingat ia narapidana yang juga seorang mantan budak, juga seorang korban *bullying* 11 saudaranya di masa kecil. Tiba-tiba tampil penuh kepercayaan diri. Mengajukan diri sebagai bendahara negara super power saat itu. Nampaknya Yusuf sang Nabi itu telah belajar banyak hal dari keza-

liman-kezaliman yang ia hadapi dengan diam dan penuh toleran. Di mana hal itu selama ini telah merugikannya begitu jauh. Ia menjadi korban dan masyarakat banyak, pun menjadi korban karena sikap diam pasrahnya itu selama puluhan tahun.

Ia yang selama ini terkenal karena ketampanan, sopan, dan rendah hati itu kini bertekad untuk bersikap proporsional terhadap situasi, mindset dan sikap politiknya. Diam di hadapan kezaliman dan sistem yang korup bukan lagi emas, tapi pengingkaran terhadap amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Pengingkaran terhadap nilai keadilan.

Jika ia tak berubah, maka nasib dirinya dan kaumnya tak akan berubah. Yusuf Alaihissalam secara sadar dan kritis bermetamorfosis menjadi ratu adil, pemimpin perubahan. Tak terbayangkan keengerian peradaban, kematian banyak orang oleh bencana kelaparan dan kemarau panjang jika ia diam seperti semula. Dan sejarah menulis semua itu dengan tinta merahnya sebagai kesalahan Yusuf karena tak tampil menjadi pemimpin di saat situasi membutuhkan dirinya. Dan ia menolak misi utama kekhilafahan.

Ide dasar dari buku 'From Minus to Plus' adalah memberikan gambaran tentang perubahan komunitas pekerja migran yang tinggal di pedesaan terkait isu perlindungan pekerja migran. Sebelumnya, kondisi komunitas pekerja migran kita ketahui berada pada sisi negatif. Di mana mereka merasa pasrah, menerima ketidakadilan sebagai takdir, dan tidak tahu bagaimana mengadukan kasus mereka.

Namun setelah perubahan, mereka menjadi lebih memiliki inisiatif dan progresif. Tidak hanya mampu membantu diri sendiri, tetapi juga mampu memberikan bantuan kepada tetangga dan warga lain yang menjadi korban pelanggaran hak pekerja migran. Mereka

yang sebelumnya terpinggirkan dan tidak didengar menjadi lebih diakui. Mereka berhasil mendorong lahirnya peraturan daerah dan desa, mengubah komposisi anggaran pembangunan desa, serta mampu menyuarakan persoalan mereka dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional.

Mengapa perubahan ini begitu mengagumkan? Bukankah manusia adalah makhluk evolusi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membangun peradaban. Evolusi *ala* Darwin memerlukan waktu ribuan tahun. Namun perubahan komunitas pekerja migran yang dimodifikasi melalui program 'Optimalisasi Peran Struktur Sosial' yang disebut LSD (Lembaga Sosial Desa) justru berhasil terwujud dalam waktu hanya enam tahun proyek. Dari 2018 hingga 2023.

LSD adalah organisasi informal yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang dibentuk Advokasi Pekerja migran Indonesia (ADBMI) untuk menangani persoalan pekerja migran di masing-masing desa. Perubahan ini melebihi transformasi ulat menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Transformasi ulat hanya mempengaruhi tubuh dan ritme kerjanya, tetapi tidak mampu mengubah kepompong yang membungkus proses perubahan itu, juga tidak mengubah ranting atau pohon yang menyediakan lingkungan untuk perubahan tersebut.

Program yang dijalankan ADBMI dengan dukungan AWO International di lima desa pengirim Pekerja Migran di Kabupaten Lombok Timur mampu mendorong perubahan dalam diri sendiri dan lingkungan (stakeholder lainnya). Mulai dari perubahan individu, manajemen organisasi LSD, hingga advokasi kebijakan di tingkat mikro (keluarga dan pemerintah desa) dan hingga pemerintah daerah.

Melalui buku ini, pelaku pemberdayaan dapat mempelajari dinamika pembentukan struktur sosial di lokasi kerja yang kompleks. Menemukan potensi kader, mengatasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Buku ini juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam komunitas yang tradisional berbasis patriarki dan tantangan dalam kebijakan yang seringkali tidak seimbang. Pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan dapat mempelajari bagaimana membangun kepercayaan diri para pengurus LSD yang sebelumnya merupakan korban dan kurang akrab dengan literasi, kini berbicara lantang dan yakin membangun kemitraan dengan pihak eksternal.

Selain itu buku ini juga menampilkan inspirasi tentang menjaga keberlanjutan kinerja struktur sosial LSD pascaproyek, serta menggambarkan kegiatan penggalangan dana yang sedang berlangsung.

Lombok Timur, 5 Desember 2023

Roma Hidayat

Ketua ADBMI

PROLOG



CERITA KELAM PEKERJA MIGRAN DI GUMI PATUH KARYA

DI TENGAH pesona alam yang menakjubkan, tersimpan kisah pahit yang melukai hati di Kabupaten Lombok Timur. Tak terlalu diperhatikan namun merajalela di kedalaman. Ada sederet tragedi. Ribuan pekerja migran dari tempat ini memilih melangkah meninggalkan tanah kelahiran demi mencari kehidupan yang lebih baik di negeri asing. Namun dibalik impian mereka, terpendam rintangan yang meresahkan.

Salah satu persoalan utama yang menghantui pekerja migran adalah ketidakpastian pekerjaan. Banyak dari mereka terjerat di sektor informal di luar negeri tanpa jaminan kontrak yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk upah yang tak sebanding dengan kerja keras mereka, serta jam kerja yang melelahkan.

Tak hanya itu, tantangan besar juga menerpa pekerja migran dari Kabupaten Lombok Timur terkait perizinan dan prosedur migrasi. Proses pemberian izin kerja dan visa begitu rumit, memerlukan biaya besar, dan seringkali memakan waktu yang tak terduga. Akibatnya,



***DISAMBUT HARU:** Istri jenazah korban kapal tenggelam Dedi Suryadi, warga Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga menangis haru di hadapan peti jenazah suaminya. (2022).*

status hukum mereka di negara tujuan menjadi tak pasti, meningkatkan risiko deportasi, serta rentan terhadap manipulasi oleh calo atau agen yang tidak berizin.

Beratnya beban psikologis dan sosial juga melanda para pekerja migran akibat pemisahan dari keluarga. Banyak dari mereka yang terpaksa meninggalkan orang terkasih untuk bekerja di luar negeri. Membiarkan anak-anak dan pasangan hidup di tanah air. Hal ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa, dengan masalah psikologis yang serius, khususnya ketika komunikasi dengan keluarga sulit dijalin.

Pulang ke kampung halaman juga tidak selalu berarti 'damai' bagi pekerja migran. Banyak di antara mereka harus menghadapi pandangan miring di masyarakat lokal karena status mereka sebagai pekerja migran. Sulit untuk diterima kembali dan diintegrasikan

setelah menghabiskan waktu yang panjang di luar negeri.

Lombok Timur Penyumbang Terbesar Pekerja Migran

Indonesia yang mempesona dengan keberagaman alam dan budaya juga menyimpan kisah pahit di balik gemerlapnya. Negara ini menjadi lautan perpindahan manusia terbesar di Asia, di mana setiap tahunnya sekitar setengah juta jiwa memutuskan berlayar mencari peluang baru.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Lombok Timur, sebagai bagian dari keindahan Nusa Tenggara Barat, mencatatkan diri sebagai kontributor terbesar di Indonesia dengan mengirimkan 40 ribu warga setiap tahunnya, seperti yang diungkapkan oleh BP2MI.

Namun ironisnya, cerita di balik keberanian mereka ini penuh dengan bayang-bayang bahaya. Mereka sebagian besar terombang-ambing dalam migrasi yang sarat dengan risiko. Tanpa perlengkapan yang memadai, dokumen yang sah, dan seringkali menjadi mangsa praktik pemalsuan data oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dalam riak-riak gelombang migrasi ini, banyak yang terjebak dalam pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung: perbudakan modern, penyiksaan, ketidakadilan upah, kekerasan seksual, penipuan, bahkan perdagangan manusia. Dan dalam tragedi ini, perempuan seringkali menjadi korban yang paling rentan dan menderita dengan derajat yang lebih dalam.

Isu utamanya terletak pada kebijakan yang masih menampakkan bias gender di sektor pekerja migran, ketidaktertiban akses informasi mengenai situasi kerja dan metode migrasi yang aman, serta minimnya layanan keadilan bagi korban.

Disamping itu, budaya patriarki dalam masyarakat turut

berkontribusi dalam mengurungkan perempuan dan anak perempuan sebagai kelas kedua, bahkan memandang mereka sebagai "hak milik". Situasi ini semakin buruk ketika perempuan memilih menjadi pekerja migran, di mana mereka mengalami pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk perbudakan modern, kekerasan seksual, hingga kondisi kehamilan yang tidak diinginkan dengan status hukum anak yang tak jelas.

Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, karakteristik Pekerja migran asal Lombok, khususnya suku Sasak, cenderung pasif dan menerima ketidakadilan sebagai takdir, kurang berani dalam memperjuangkan hak-haknya dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia.

Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas penduduknya adalah suku Sasak merupakan bagian dari Provinsi NTB. Per tahun 2018, wilayah di ujung timur pulau Lombok ini memiliki populasi sekitar 1,1 juta jiwa dari total 4,3 juta jiwa penduduk di seluruh Provinsi NTB yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota.

Kepadatan penduduk di Lombok Timur mencapai 660 orang per kilometer persegi dengan mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah (rata-rata lama sekolah adalah 6,5 tahun) dan mata pencaharian utama sebagai buruh tani dengan penghasilan dari upah menanam tanah milik orang lain.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional tahun 2004, rata-rata kepemilikan lahan penduduk Lombok Timur sangat terbatas, hanya sekitar 0,25 hektar per keluarga.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota

Keluarganya melalui UU Nomor 6 tahun 2012. Kebijakan perlindungan pekerja migran diatur dalam UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan yang terbaru UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan reformasi yang signifikan dalam perlindungan pekerja migran.

Migrasi di Lombok Timur

Di Lombok Timur, data yang dikumpulkan oleh ADBMI pada tahun 2009 dan 2010 di 10 Desa menunjukkan bahwa rata-rata 10 sampai 15 persen dari penduduk desa tersebut berada di luar negeri sebagai Pekerja migran setiap tahunnya. Sejarah migrasi sebagai Pekerja migran dimulai pada sekitar akhir 1970-an ke Malaysia, terutama untuk bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit Malaysia.

Migran dari Lombok Timur pada masa itu melakukan perjalanan yang sangat menantang dengan menggunakan kapal layar kayu yang disewa dari orang Sulawesi. Perjalanan tersebut memakan waktu hingga 1,5 bulan di tengah lautan sebelum mencapai daratan Malaysia.

Sejak saat itu kondisi pekerja migran dari Lombok Timur tidak mengalami banyak perubahan; mereka sering bekerja di sektor yang gelap, kotor, dan berbahaya atau sering disingkat 3D (*Dark, Dirty, Danger*). Rekrutmen secara ilegal juga kerap terjadi. Anak-anak dengan status palsu sering menjadi korban perdagangan manusia, tidak menerima upah, menjadi korban kekerasan dari majikan seperti perkosaan, dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.



***PEMAKAMAN:** Warga sedang memakamkan jenazah salah seorang PMI asal Lotim yang meninggal dunia pada kecelakaan kapal karam di Malaysia, di pekuburan umum Pringgasela, Kecamatan Pringgasela. (2022)*

Pemerintah daerah belum mampu melakukan banyak perubahan signifikan. Bahkan dalam hal dasar perlindungan seperti database, masih terdapat banyak kekacauan. Masalah pendataan lintas instansi pemerintah terjadi bertahun-tahun dan masih berlanjut hingga saat ini. Contoh pendataan pada masa moratorium pada tahun 2011 yang lalu menunjukkan ketidaksesuaian angka antara Disnakertrans (Sosial, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja) Lotim dengan BP3MI NTB. Data penempatan PMI tahun 2012 juga menunjukkan ketidaksesuaian yang serupa. Situasi ini juga terjadi pada data penempatan pada tahun 2015 yang dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI.

Migrasi di Lombok Timur masih merupakan migrasi yang tidak aman, yang telah menimbulkan banyak korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban secara langsung adalah para pekerja migran itu sendiri, baik pria maupun wanita. Sedangkan korban tidak langsung adalah keluarga mereka, terutama perempuan dan

anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga pekerja migran. Anak-anak dari keluarga pekerja migran menghadapi tekanan dan masalah yang dua kali lipat lebih berat dibandingkan dengan anak-anak dari desa lain, namun belum mendapatkan perhatian serius.

Berbagai masalah seperti perceraian tinggi di kalangan keluarga pekerja migran, kehilangan figur penting dalam masa pertumbuhan mereka, penelantaran, berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, pernikahan dini, gizi buruk, dan menjadi korban perdagangan manusia adalah sebagian dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga pekerja migran.

Pekerja Migran Perempuan

Perubahan dalam wajah migrasi di Lombok Timur yang menuju ke arah feminisme atau gelombang Pekerja Migran Perempuan (PMP) terjadi sekitar tahun 2000. Fenomena ini terus meningkat hingga saat ini. Meskipun begitu, diskriminasi berbasis gender tetap saja dialami oleh mereka, terutama stigma negatif terhadap PMP.

Ungkapan lokal seperti "*lalo begawean bisok botol*," yang menggambarkan pekerjaan mencuci botol, menciptakan stigma negatif terhadap pekerjaan PMP, dianggap melecehkan, dan menjadikan mereka pelayan yang tunduk kepada majikan, bahkan dalam beberapa kasus termasuk aspek seksual (meskipun untuk perempuan yang bekerja di Arab Saudi dan dapat menunaikan ibadah haji, masyarakat kurang mengapresiasi hal tersebut karena mereka menjadi Pekerja migran).

Poligami, kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan aset dan ditinggalkan oleh pasangan adalah masalah yang sering kali menimpa PMP. Di mana remitansi yang mereka kirimkan seringkali

digunakan oleh pasangan untuk selingkuh atau menikah lagi dengan perempuan lain.

Perempuan juga lebih rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan dalam penempatan sebagai Pekerja migran, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pria.



BEKAS LUKA: Jamilah, PMI asal Dusun Poton Bako, Desa Jarowaru, Kecamatan Jerowaru memperlihatkan bekas luka bakar yang dilakukannya majikannya ketika bekerja sebagai PRT di Abu Dhabi.

LINGKARAN PERSOALAN PEKERJA MIGRAN

DI LOMBOK Timur, lingkaran persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran memiliki dimensi kompleks yang mencakup berbagai aspek. Beberapa permasalahan yang muncul dalam konteks ini termasuk kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan sebelum keberangkatan, tidak adanya regulasi yang kuat terkait rekrutmen tenaga kerja, dan minimnya pemahaman terkait hak-hak mereka dalam pekerjaan.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh minimnya pengawasan pemerintah terhadap agen perekrutan, yang sering kali memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan perekrutan yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, terbatasnya pengetahuan mengenai akses layanan hukum juga membuat banyak korban pelanggaran hak tidak bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Tidak hanya itu, persoalan ini juga menyangkut ketersediaan dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, informasi tentang hak dan kewajiban pekerja, serta profil agensi perekrut yang tidak tersedia secara memadai di desa-desa. Ini memberikan ketidakpastian dan kerentanan yang tinggi bagi pekerja migran.



***TUNJUKKAN BEKAS LUKA:** Siti Linda Ekayanti, 27 tahun, warga Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga memperlihatkan bekas luka yang diduga dilakukan majikannya saat bekerja di Arab Saudi.*

Situasi ini semakin kompleks dengan tingginya tingkat pelanggaran hak dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan di keluarga pekerja migran. Hal ini sering kali dipicu oleh masalah struktural dan budaya, seperti manajemen rumah tangga yang patriarkhal dan kurangnya apresiasi positif dari masyarakat.



BERHARAP YANG TERBAIK: Ruka'iyah, warga Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga memperlihatkan foto dalam kartu identitas putranya Herna Wandu, kemarin (20/12). Herna Wandu menjadi korban kapal karam di Malaysia yang membawa 50 CPMI ilegal.

Dari beberapa temuan yang didapatkan di lapangan, setidaknya ada 7 faktor utama yang sekaligus menjadi gambaran umum problematika yang dialami para pekerja migran di Lombok Timur.

Beberapa permasalahan tersebut dirincikan dalam poin-poin di bawah ini:

1. Keterbatasan Kesempatan Kerja Lokal

Wilayah Lombok Timur memiliki keterbatasan dalam lapangan pekerjaan yang berpenghasilan layak. Ini terjadi karena kurangnya diversifikasi ekonomi dan peluang pekerjaan yang terbatas, khususnya di sektor-sektor non-pertanian. Ini mendorong banyak warga untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai opsi untuk meningkatkan pendapatan dan menopang kehidupan keluarga mereka.

2. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah Lombok Timur serta kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja membuat penduduk kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan lokal yang memadai secara ekonomi. Hal ini mendorong mereka mencari pekerjaan di luar negeri yang mungkin membutuhkan keterampilan yang lebih sedikit.

3. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Masalah kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang stabil menjadi pemicu utama migrasi buruh. Kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kemiskinan dapat memaksa orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga.

4. Peran Agen Perekrutan yang Tidak Etis

Proses perekrutan yang dilakukan oleh agen perekrutan sering kali tidak diatur dengan baik, memungkinkan praktik-praktik tidak etis seperti penipuan dalam informasi kerja, biaya perekrutan yang tinggi, serta kekurangan informasi yang akurat terkait pekerjaan di luar negeri.

5. Persiapan yang Tidak Memadai Sebelum Berangkat

Kekurangan persiapan yang baik sebelum berangkat, seperti kurangnya informasi tentang negara tujuan, kurangnya pelatihan budaya atau bahasa, serta minimnya pemahaman tentang hak-hak pekerja, dapat membuat pekerja migran rentan terhadap situasi yang tidak diinginkan di negara tujuan.

6. Kurangnya Perlindungan dan Akses Layanan Kesehatan

Pekerja migran sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai di negara tujuan mereka bekerja. Selain itu, mereka juga mungkin kekurangan perlindungan hukum yang diperlukan terkait kondisi kerja mereka.

7. Tingginya Tingkat Kekerasan dan Pelanggaran Hak

Tingginya tingkat kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran, terutama perempuan dan anak perempuan, merupakan dampak serius dari ketidakpastian dan ketidakteraturan di tempat kerja serta lingkungan tempat tinggal mereka di luar negeri. Hal ini memerlukan perhatian serius terhadap perlindungan dan keamanan mereka.

Persoalan Pekerja Migran Bermuara di Desa

“ADBMI memandang lingkaran persoalan pekerja migran memiliki muara utama di desa. 80 persen dari 7 poin lingkaran utama persoalan pekerja migran tersebut terdapat di lingkup pemerintah desa. Kenyataan inilah yang mendorong ADBMI memandang pentingnya sebuah gerakan di lingkup desa. Terutama dalam poin persoalan rendahnya pendidikan masyarakat desa.”

MELAHIRKAN LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD)

PENYEBAB KETIDAKBERDAYAAN pekerja migran dalam menghadapi masalah di Lombok Timur mencakup beberapa aspek yang mendalam. Salah satunya adalah belum adanya lembaga sosial yang mampu memberikan wadah bagi mereka untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas, serta keterampilan sebelum memulai pekerjaan di luar negeri. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang dapat mempersiapkan mereka dengan pemahaman bahasa dan budaya di negara tujuan juga menjadi salah satu faktor yang membatasi kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di luar negeri. Ketidakmampuan untuk memahami hak-hak mereka sebagai pekerja migran dan kurangnya persiapan sebelum berangkat menjadi hambatan utama.

Selain itu, perhatian khusus dari pemerintah desa juga terbukti minim, sehingga

Kurangnya dukungan lembaga yang mampu memberikan bantuan dalam menghadapi masalah administratif, sosial, dan hukum yang muncul saat mereka berada di luar negeri juga turut menambah tingkat ketidakberdayaan pekerja migran.

pekerja migran kesulitan dalam menemukan tempat untuk mengadu serta mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Kurangnya dukungan lembaga yang mampu memberikan bantuan dalam menghadapi masalah administratif, sosial, dan hukum yang muncul saat mereka berada di luar negeri juga turut menambah tingkat ketidakberdayaan pekerja migran. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret untuk memperkuat lembaga sosial dan dukungan dari pemerintahan setempat agar pekerja migran memiliki akses yang lebih baik dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul.

—

Dalam menangani serangkaian masalah yang muncul, kelemahan lembaga formal, terutama di tingkat pemerintahan daerah dan desa, menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki. Dalam konteks ini, langkah strategis diperlukan untuk menciptakan sebuah lembaga struktur sosial yang dinamis, didorong secara langsung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat.

Struktur sosial diperlukan karena merupakan kerangka yang mengatur interaksi dan hubungan antarindividu serta kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks penyelesaian masalah, struktur sosial menjadi landasan yang memungkinkan terbentuknya entitas atau lembaga yang dapat menangani masalah tersebut.

Alasan utamanya adalah struktur sosial membantu mengatur koordinasi, organisasi, pembagian peran, serta tanggung jawab antarindividu dan kelompok dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Selain itu, struktur sosial juga memastikan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan membentuk proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan konsensus dan pertimbangan dari berbagai pihak terlibat.

Dengan adanya struktur sosial yang mapan, entitas atau lembaga yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, seperti perlindungan bagi pekerja migran, dapat dikelola secara berkelanjutan. Sebuah struktur sosial yang kuat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembentukan entitas yang mampu mengurai dan menyelesaikan masalah kompleks di dalam masyarakat. Contoh nyata dari penerapan struktur sosial ini dapat dilihat pada Lembaga Sosial Desa (LSD), yang mampu berperan sebagai solusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh komunitas pekerja migran di desa-desa.

Advokasi Buruh migran Indonesia (ADBMI) telah melangkah maju untuk mengatasi hambatan ini dengan merintis pembentukan Lembaga Sosial Desa (LSD). LSD ini direncanakan untuk dijalankan oleh dan untuk masyarakat setempat, bekerja sama dengan mantan pekerja migran, serta berkoordinasi dengan struktur pemerintahan di tingkat desa. LSD menjadi solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh pekerja migran.



Proses pembentukan LSD yang diinisiasi oleh ADBMI mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dan mantan pekerja migran, memastikan bahwa solusi-solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terkena dampak.

lindungan bagi pekerja migran.

Proses pembentukan LSD yang diinisiasi oleh ADBMI mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dan mantan pekerja migran, memastikan bahwa solusi-solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terkena dampak. Sinergi dengan struktur pemerintahan desa juga menjadi bagian kunci untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari LSD sebagai lembaga sosial yang efektif dalam menangani berbagai masalah pekerja migran.

Program ADBMI yang bekerjasama dengan AWO International memilih lima desa tempat program LSD dicanangkan. Desa-desa tersebut dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan pengirim utama pekerja migran
2. Kantong kemiskinan (angka kemiskinan tinggi)
3. Indeks pembangunan manusia rendah
4. Potensi resiko bencana tinggi
5. Angka kawin cerai tinggi
6. Infrastruktur jalan terbatas (terisolasi)

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sebuah entitas yang berpusat pada masyarakat dan mampu merespons permasalahan pekerja migran secara langsung. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, LSD diharapkan dapat menjadi sebuah wahana efektif untuk merumuskan solusi dan mengimplementasikan program per-

7. Merepresentasikan masyarakat tepi kota, pantai, dan gunung.

Tujuh kriteria itulah yang dimiliki Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, dan Desa Anjani, Kecamatan Anjani.

MINUS

LIMA DESA PROGRAM

DESA WANASABA

Desa Wanasaba merupakan desa induk di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dari data tahun 2018 (pertama kali program ADBMI masuk), jumlah total penduduk Desa Wanasaba sebanyak 7.122 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.421 KK dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.434 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.688 jiwa.

Dalam data yang dihimpun di awal program, jumlah PMI di Wanasaba cukup signifikan. Dengan total 736 orang yang terdiri dari 510 pekerja migran perempuan dan 226 pekerja migran laki-laki. Dominasi negara tujuan adalah Malaysia dan Saudi Arabia.

Awal mula migrasi masyarakat Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dengan adanya transmigrasi. Proses transmigrasi dimulai sejak tahun 1974 sampai tahun 1985. Penduduk masyarakat Desa Wanasaba melakukan transmigrasi dengan berbagai tujuan daerah yang berbeda. Di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan

daerah-daerah lainnya.

Perjalanan transmigrasi masyarakat Desa Wanasaba saat itu cukup menarik hati masyarakat lainnya. Transmigrasi tersebut berangkat dari kemauan serta faktor kebutuhan ekonomi untuk mencoba peluang mencari penghidupan yang lebih baik di tempat baru.

Selepas proses transmigrasi mulai berkurang, pada 1986 masyarakat Desa Wanasaba diperkenalkan oleh seorang tekong atau calo untuk merantau ke luar negeri. Pada tahun tersebutlah masyarakat Desa Wanasaba memulai migrasi ke luar negeri. Migrasi tersebut dimulai oleh Amaq Haf dari Dusun Jorong Lauk, Lalu Nurul Ihsan, Amaq Rehan dari Dusun Jorong Daya Desa Wanasaba dan Lalu Subaedi dari Dusun Beak Daya.



Proses migrasi yang dilakukan adalah dengan jalur non prosedural atau ilegal dengan menerima instruksi dari calo atau tekong. Rute perjalanannya saat itu adalah mulai berangkat dari Desa

Wanasaba menuju pelabuhan Lembar di Lombok Barat, kemudian naik kapal menuju pelabuhan Gili Manuk-Jawa Timur. Dari sana perjalanan selanjutnya dilakukan dengan naik bus menuju Tanjung Perak Surabaya lalu ke pelabuhan Merak Banten menuju Dumae Sumatera dan selanjutnya naik kapal laut menuju Malaysia dengan waktu tempuh sekitar empat jam perjalanan. Sampai di sana mereka disambut tekong yang ada di Malaysia.

Perjalanan dari Desa Wanasaba sampai Malaysia terhitung tiga hari empat malam dengan total biaya Rp 100 ribu. Malaysia adalah negara tujuan utama bagi para pekerja migran disebabkan negara yang terdekat dengan Indonesia.

Disamping itu, Malaysia juga dirasa sangat menjanjikan. Selain itu tekong tujuan ke Malaysia sangat banyak sehingga masyarakat langsung memilih untuk bermigrasi ke Malaysia. Para tekong pada saat itu hanya memperkenalkan Malaysia sebagai negara tujuan untuk bermigrasi.

Faktor lain Malaysia sebagai negara tujuan bermigrasi adalah orang tua. Jika bukan Malaysia, para orang tua cenderung akan tidak mengizinkan anaknya untuk pergi bermigrasi atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di sisi lain ada persamaan bahasa antara Malaysia dengan Indonesia sehingga sangat memberikan harapan besar bagi para PMI untuk bermigrasi ke negeri Jiran tersebut.

Faktor ekonomi merupakan yang paling mempengaruhi masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Namun dengan kondisi tersebut tidak memberikan hasil yang baik bagi para keluarga PMI yang menanti harapan bagi para PMI. Hal tersebut disebabkan para PMI masih kesulitan dalam proses pengiriman uang, lebih-lebih pada saat itu masyarakat belum mengenal perbankan.

Dari sisi budaya para PMI tidak membawa perubahan di masyarakat Desa Wanasaba. Artinya budaya yang diketahui di

Malaysia tidak dibawa pulang ke desanya. Sebagai contoh, pada bahasa yang digunakan. Sepulang dari Malaysia, PMI dari Desa Wanasaba mempertahankan dan menggunakan bahasa, gaya hidup, atau adat istiadat mereka sebagai warga Wanasaba.

Menjadi PMI bagi masyarakat Desa Wanasaba adalah pilihan hidup. Sebab menjadi PMI bisa mengubah kondisi hidup atau ekonomi keluarga. Disamping itu menjadi PMI merupakan langkah yang sangat menjanjikan. Hampir sebagian besar masyarakat Wanasaba akan bermigras setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Masyarakat Desa Wanasaba memilih menjadi PMI selain menjadi petani baik laki-laki maupun perempuan.

Perempuan yang menjadi memilih menjadi pekerja migran di Wanasab biasanya yang sudah menyandang status janda. Alasannya adalah untuk membuang masalah asmara yang menyimpannya sambil sekaligus memperbaiki kehidupannya ekonominya. Dapat dikatakan sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.

Menjadi PMI bagi masyarakat desa di sana sudah menjadi hal yang biasa dipandang oleh masyarakat. Baik PMI perempuan dan juga remaja, bahkan anak-anak.

Adapun upaya yang dilakukan masyarakat untuk membantu PMI yang menjadi korban, baik berupa korban penganiayaan, kematian dan persoalan PMI lainnya adalah lewat Pemerintah Desa Wanasaba. Pemerintah desa meneruskan laporan masyarakat ke PJTKI yang memberangkatkannya atau ke dinas pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun sampai tahun 2018, masyarakat yang menjadi PMI belum ada yang memberikan laporan tentang adanya korban penganiayaan dan lain sebagainya. Khususnya perempuan.

DESA ANJANI

Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur merupakan desa yang berada di tepi kota. Data tahun 2016 menunjukkan total jumlah penduduknya sebanyak 11.416 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.338 jiwa dan perempuan sebanyak 6.078 jiwa. Adapun jumlah tersebut terdiri dari sebanyak 3.544 kepala keluarga (KK).

Pada 2018, ADBMI mencatat jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anjani sebanyak 553 jiwa yang terdiri dari 454 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Jumlah PMI yang mengenyam pendidikan SD sebanyak 257 orang, SMP 98 orang, dan SMA sebanyak 122 orang. Adapun yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 26 orang. Sisanya 50 orang tidak bersekolah.

Masyarakat Desa Anjani mulai bermigrasi pada tahun 1982. Salah seorang yang tercatat menjadi PMI pertama di desa itu bernama Amaq Suhandi. Proses perjalanan Amaq Suhandi ke Malaysia ditempuh dengan menggunakan kapal laut dengan rute pelayanan dari pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Di tahun itu, ia hanya membutuhkan Rp 50 ribu untuk sampai ke negeri Jiran.

Tak jauh berbeda dengan masyarakat di Desa Wanasaba, Malaysia adalah negara pilihan dan yang paling dikenal oleh para PMI di Anjani sehingga Malaysia sebagai pilihan utama untuk pergi merantau ke luar negeri.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat desa Anjani memilih bermigrasi. Sulitnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab tingginya angka migrasi di desa tersebut. Banyak dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Selain itu, merantau ke Malaysia juga dilakukan untuk dapat membangun rumah hunian.

Pulang dari rantauan, para PMI tidak membawa perubahan yang

begitu drastis di masyarakat. Tidak ada perubahan bahasa dan gaya hidup sepulang dari Malaysia. Kebiasaan hidup di lingkungan masyarakatnya tetap dipertahankan tanpa mengadopsi budaya atau gaya hidup di luar negeri.



Tidak jauh berbeda dengan Wanasaba, PMI dari Desa Anjani juga tidak sedikit merupakan PMI perempuan, remaja, bahkan anak-anak. Selain keinginan membangun perekonomian keluarga, perempuan desa yang biasanya bekerja di sektor pertanian belakangan semakin kesulitan karena semakin pesatnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya lahan tanaman.

PMI Desa Anjani tidak terbebas dari beragam kasus yang pada umumnya kerap didapatkan pekerja migran. Selama ini, kasus-kasus pekerja migran ditangani oleh pemerintah Desa Anjani. Salah satu

upaya yang telah dilakukan adalah membantu korban menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan penyalur.

Kendati demikian, sebelum LSD terbentuk, penanganan kasus dan advokasi korban pekerja migran di desa tersebut belum maksimal.

DESA KETAPANG RAYA

Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak merupakan desa yang berada di tepi pantai. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah Lombok Timur bagian selatan. Total jumlah penduduknya berdasarkan data per tahun 2015 sebanyak 5223 jiwa yang terdiri dari 2.317 laki-laki dan 2.906 perempuan. Adapun total jumlah Kepala Keluarganya (KK) sebanyak 1.340.



Aktivitas nelayan di Desa Ketapang Raya.

Tujuan migrasi yang utama masyarakat Desa Ketapang Raya sebagian besar Malaysia dan Saudi Arabia. Data tahun 2018, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari desa ini sebanyak 350 orang yang terdiri dari 249 PMI laki-laki dan 101 PMI perempuan. Di tahun yang sama, terdapat 400 mantan PMI dengan rincian 277 laki-laki dan 123 perempuan.

Migrasi pertama di Desa Ketapang Raya terjadi sekitar tahun 1970. PMI pertama dari sana bernama Genep. Ia berasal dari Dusun Lungkak Timur. Saat itu usianya masih cukup muda saat memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halaman.

Alasan ekonomi menjadi pemicu utamanya untuk memutuskan menjadi PMI. Saat itu ia membutuhkan biaya Rp 25 ribu. Biaya itu ia dapatkan dari hasil meminjam di tetangga. Genep berangkat dari Lungkak menuju Lembar. Selanjutnya perjalanan ke Surabaya dengan menempuh waktu sekitar empat hari.

Selanjutnya dari Surabaya perjalanan dilanjutkan ke Bengkalis. Untuk sampai di Bengkalis Genep menempuh perjalanan sekitar 15 hari. Sempat menginap di Bengkalis selama empat hari, Genep selanjutnya masuk ke Malaysia Barat melalui jalan tikus dengan memakai tongkang. Di Malaysia Genep bekerja di ladang kelapa sawit selama 4 tahun. Hasil dari Malaysia digunakannya untuk membayar hutang dan membangun rumah di kampung halamannya.

Selanjutnya migrasi kedua terjadi sekitar tahun 1982. Adalah Sahdi dari Dusun Telaga Bagek yang memilih menjadi PMI karena ingin memulihkan kondisi ekonomi. Seperti halnya Genep, Sahdi juga berangkat ke Malaysia dengan menempuh jalur laut dengan rute Lungkak-Kertasari-Sumbawa-Batam (Batu merah) dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih dua pekan.

Persoalan ekonomi menjadi alasan mendasar yang mendorong masyarakat Ketapang Raya berbondong-bondong menjadi PMI.

Pilihan merantau seakan sudah telah membudaya dalam diri masyarakat saat menemukan persoalan ekonomi yang kita menghimpit hidupnya. Masyarakat meyakini bahwa mereka harus memiliki pekerjaan tetap untuk dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Akibat dari jumlah PMI yang banyak di Ketapang Raya menyebabkan perubahan pekerjaan masyarakat untuk bertahan hidup. Dari yang sebelumnya didominasi petani dan nelayan, sejak adanya migrasi, tidak sedikit masyarakat yang mulai mencoba usaha seperti berjualan, membuka bengkel, dan usaha jasa dan barang lainnya.

Selain itu, migrasi juga menyebabkan terjadinya perubahan pada kehidupan sosial masyarakat. Seperti rumah panggung ke rumah permanen, dan juga pakaian yang dikenakan masyarakat. Tidak sedikit juga masyarakat yang berhasil di luar negeri dan sepulangnya membeli kendaraan roda dua, bahkan roda empat.

Awalnya persepsi masyarakat tentang PMI perempuan dipandang sangat memalukan karena tugas perempuan itu hanya di dapur, sumur, dan dikasur. Kalau perempuan keluar rumah apalagi pergi keluar negeri, maka akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tidak sedikit juga yang akan menilainya 'menjual diri' di luar negeri.

Namun pandangan itu berangsur-angsur pudar setelah jumlah perempuan yang berangkat merantau ke luar negeri terus bertambah. Melihat hasilnya, tidak sedikit dari orang tua yang jsutru menganjurkan putrinya untuk merantau.

Selain itu, tingginya angka perceraian juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah PMI perempuan. Hidup sebagai single parent mengharuskan mereka bekerja mencari nafkah untuk menghidupi buah hatinya.

Selain itu, PMI perempuan juga dalam proses pemberangkatan

lebih dimudahkan dibanding laki-laki. Administrasi dan biaya yang rendah bahkan gratis menjadi alasan lelaki (suami) atau orang tua mengizinkan perempuan atau istri mereka berangkat menjadi PMI.

Penanganan kasus PMI di Ketapang Raya sebelum adanya LSD bisa dikatakan tidak ada. Saat program ini pertama kali diperkenalkan, banyak laporan dari anggota pertama LSD yang menjelaskan kasus-kasus yang mereka tidak ketahui bagaimana harus menyelesaikannya.

DESA SURADADI

Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember tahun 2014, Desa Suradadi mempunyai penduduk sebanyak 6.616 jiwa yang terdiri dari 3.265 laki-laki dan 3.351 perempuan yang tersebar di setiap kekadusan.

Masyarakat Desa Suradadi sebagian besar bermigrasi ke Malaysia dan Saudi Arabia. Di tahun 2018, ADBMI mencatat sebanyak 397 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan 375 laki-laki dan 22 orang perempuan. Sementara terdapat 636 mantan PMI yang terdiri dari 588 laki-laki dan 48 perempuan.

Sejarah migrasi di Suradadi pertama kali terjadi pada sekitar tahun 1975. Ialah Muhali warga dari Dusun Midang yang berangkat ke Malaysia dengan biaya Rp 25 ribu.

Diceritakan, Muhali berangkat ke negeri Jiran dengan hanya menaiki tongkang (sejenis perahu kecil). Bersama rombongan ia menempuh jalur laut dengan rute Desa Lungkak-Lembar-Surabaya-Bengkalis-Malaysia Barat. Muhali membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk sampai ke negeri seberang.

Selanjutnya Malaysia Muhali bekerja di kebun kelapa sawit.

Selama 5 tahun bekerja di tanah rantau, Muhali dapat membayar hutang dan membangun rumah serta membiayai perkawinannya.

Persoalan mendasar yang mendorong masyarakat Suradadi menjadi PMI adalah persoalan ekonomi. Kemiskinan yang disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan tidak banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian tetap.

Dua persoalan klasik itulah yang juga terjadi sampai saat ini. Bahkan melihat dari lini masa migrasi yang ada, persoalan dan alasan PMI dari generasi pertama sampai sekarang adalah minimnya lapangan pekerjaan di kampung halaman.

Seperti halnya di Ketapang Raya, dampak migrasi terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat juga cukup signifikan di Desa Suradadi. Seperti halnya perubahan mata pencaharian warga yang semula menjadi petani sekarang sudah beralih ke usaha lain.

Tidak hanya itu, terdapat juga perubahan di sektor pertanian. Mantan PMI di Suradadi menjadi petani yang bercocok tanam secara modern. Hal itu disebabkan oleh pengalaman mereka saat bekerja di ladang pertanian di Malaysia.

Selain itu perubahan gaya hidup juga terlihat cukup signifikan. Hal itu berupa gaya berpakaian dan penggunaan teknologi seperti kendaraan dan alat telekomunikasi.

Pandangan masyarakat tentang PMI perempuan awalnya dipandang sebelah mata di Desa Suradadi. Namun pandangan tersebut berangsur sirna seiring terus bertambahnya jumlah perempuan yang merantau ke luar negeri. Perubahan ekonomi yang terlihat dari migrasi perempuan tersebut juga mempengaruhi perubahan cara pandang masyarakat. Sehingga tidak sedikit orang tua yang justru menganjurkan anak perempuannya, atau suami yang mengizinkan istrinya untuk merantau.

Seperti halnya di Ketapang Raya, angka perceraian juga menjadi

penyebab meningkatnya jumlah PMI perempuan. Hidup sendiri mengharuskan mencari alternatif ke luar negeri untuk dapat menghidupi anak-anaknya.



Kegiatan 'Sosialisasi Migrasi Aman' di Desa Suradadi.

Penanganan kasus PMI di Suradadi sebelum adanya LSD bisa dikatakan tidak ada. Pemerintah desa dan organisasi masyarakat desa tidak secara spesifik memahami adanya program advokasi bagi warganya yang menjadi PMI. Saat program ini pertama kali diperkenalkan, banyak laporan dari para anggota perintis LSD di Suradadi yang menjelaskan kasus-kasus pekerja migran. Di mana tidak satu pun dari kasus-kasus itu yang coba diselesaikan dari tataran desa.

DESA PRINGGASELA TIMUR

Desa Pringgasela Timur berada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Desa yang merupakan pemekaran

itu memiliki total jumlah penduduk sebanyak 2.527 jiwa yang terdiri dari 1.295 laki-laki dan 1.232 perempuan dengan 756 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 1.374 penduduk Pringgasela Timur tergolong pada usia produktif dengan rincian 707 laki-laki dan 667 perempuan. Dari jumlah tersebut dipastikan sebanyak 317 orang sedang menjadi PMI ke luar negeri atau 23 persen dari total jumlah penduduk produktif. Sisanya adalah ibu rumah tangga sekaligus petani dan peternak, juga buruh tani.

Nasrudin merupakan warga dari Dusun Timuk Belimbing pertama kali bermigrasi ke Malaysia pada tahun 1987. Pada tahun itu, dengan menggunakan jalur laut mengendarai perahu sederhana, biasa disebut perahu pompong, Nasrudin tiba di Malaysia Barat.

Migrasi yang terjadi dan dilakukan oleh warga Desa Pringgasela Timur diikuti oleh peristiwa perubahan di sektor ekonomi, sosial, budaya masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan oleh asimilasi atau pembauran antara budaya lokal dengan budaya luar yang dibawa oleh PMI.

Hampir seluruh masyarakat Pringgasela Timur yang pulang dari Malaysia akan menggunakan bahasa Malaysia. Seringkali mantan PMI Malaysia berbicara bahasa melayu dan hal itu mengakrabkan warga sekitar dengan bahasa Malaysia.

Hal ini disebabkan oleh tidak sedikitnya warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan mendapatkan bahasa melayu di negara rantauannya.

Bahkan dalam beberapa pengalaman pendampingan, banyak mantan PMI Malaysia yang berpendidikan rendah belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, namun sangat mahir berbahasa Malaysia.

Pekerja Migran (PM) perempuan dari Desa Pringgasela Timur

dalam data lebih sedikit dibanding pekerja migran laki-laki. Namun jumlah tersebut terus bertambah seiring perkembangan zaman. Di sisi lain, para tekong juga mencari PM perempuan dengan mempermudah dan mempercepat proses pemberangkatannya.

Selain memudahkan proses, PM perempuan yang akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia dimudahkan dengan gaji bersih yang diterima di tempat bekerja. Tidak hanya itu, tidak sedikit dari PM perempuan yang mendapatkan majikan baik dan diberikan bonus di luar gaji bersih yang ia terima.

Penanganan kasus PMI di Desa Pringgasele Timur sebelum adanya LSD memang belum pernah dilakukan. Pemerintah desa dan organisasi masyarakat desa tidak secara spesifik memahami adanya program advokasi bagi warganya yang menjadi PMI. Terlebih di desa tersebut terdapat banyak pekerja lapangan. Bahkan agen-agen pemberangkatan tenaga kerja.



CERITA PARA PENDAMPING LSD

DALAM MELAKSANAKAN program pemberdayaan struktur sosial untuk menangani persoalan pekerja migran, ADBMI memiliki pendamping lapangan untuk Lembaga Sosial Desa (LSD). Mereka merupakan sosok yang menggawangi program tersebut di lima desa dampingan. Mereka adalah Rasyid Ridho, Fauzan, dan Widya Kuswatun Harwin.

Dari mereka bertiga, terdapat cerita tentang bagaimana potret masyarakat di desa dampingan sebelum tersentuh oleh program ADBMI dan AWO Internasional. Potret tersebut kemudian dalam buku ini digambarkan sebagai masa 'minus' komunitas masyarakat desa yang kemudian akan bertransformasi menjadi 'nol' hingga mencapai 'plus'.

Catatan ketiga pendamping ini meliputi sejumlah tahapan pendampingan. Mulai dari proses mengenalkan program ke pemerintah desa dan menjaring anggota pertama LSD dari warga setempat. Ada juga cerita tentang capaian-capaian pendampingan dan juga sejumlah cerita kemenangan-kemenangan advokasi yang mereka raih. Kemenangan atas butiran keringat dalam upaya

mengurai setumpuk persoalan dan tantangan yang mereka temui dan hadapi di lapangan.

Cerita itu bersumbu pada gambaran sejarah migrasi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat desa, PMI perempuan, dan penanganan kasus yang sebelumnya telah dipaparkan. Hal itulah yang mempengaruhi proses berdirinya LSD di masing-masing desa dampingan. Catatan ini jugalah yang sedikit tidak menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di lima desa dampingan program sebelum LSD dilahirkan.

Rasyid Ridho di Wanasaba dan Anjani

Rasyid Ridho bergabung dengan ADBMI sejak tahun 2016. Pada Tahun 2018, ia ditugaskan menjadi pendamping lapangan untuk LSD di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, dan Desa Wanasaba di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Ridho sendiri merupakan pekerja sosial yang masih muda dari Kecamatan Suela. Ia lahir pada tahun 1987. Sebelum di ADBMI, ia aktif menjadi pengurus di sebuah lembaga media bernama speaker kampung di Suela.

Pertama kali turun ke Desa Anjani dan Wanasaba, Ridho melihat langsung bayangan beban pekerjaan yang akan memberatkan pundaknya. Mengingat dan mempertimbangkan dua desa tersebut merupakan desa dengan kepadatan penduduk dan sumber daya manusia yang terbilang lebih maju dibanding dengan tiga desa dampingan program lainnya.

Berlimpahnya sumber daya manusia menurut Ridho menjadi tantangan tersendiri dalam merekrut anggota LSD. Salah satu yang ia catat dengan baik dalam proses pendampingannya adalah saat

menemui tipe masyarakat yang cenderung menilai program LSM sebagai ladang mendapatkan penghasilan. Stereotip terhadap pekerja sosial itu secara tidak langsung mematahkan harapan besar Ridho untuk membangun LSD yang telah dirancang untuk dapat dijalankan berkepanjangan.



Rasyid Ridho ditugaskan menjadi pendamping lapangan untuk LSD di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, dan Desa Wanasaba di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai contoh, saat mengajak masyarakat untuk ikut bergabung menjadi perintis LSD, sebagian besar dari masyarakat menanyakan apakah mereka akan mendapatkan honor tetap di lembaga tersebut. Ada juga yang sekadar menanyakan apakah program tersebut dapat mendatangkan uang bagi mereka.

Tentu saja tidak mudah bagi Ridho menerima kenyataan seperti itu. Ia yang sedang membawa program dengan cetak biru pemberdayaan dalam lima tahun ke depan malah disuguhi oleh kenyataan tentang kesadaran masyarakat yang masih minim tentang

sebuah gerakan pemberdayaan yang sepenuhnya berorientasi pada perubahan.

Namun dari semua yang ia temui, sekitar 75 persen dari masyarakat tersebut justru menanyakan tentang honor atau upah yang akan ia dapatkan jika bergabung dalam program tersebut. Sisanya 25 persen dalam catatan Ridho dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berbuat untuk masyarakatnya tanpa mengharapkan imbalan.

Tantangan awal tersebut tentu tak membuat Ridho patah arang. Ia yang telah dibekali oleh ADBMI dan cukup berpengalaman dalam kerja pendampingan melakukan strategi pendekatan langsung untuk mencari para perintis LSD di Anjani dan Wanasaba.

Alhasil, dalam kerja yang tak singkat, ia mendapatkan anggota LSD yang memiliki komitmen dalam menjalankan setiap program. Namun dalam upaya tersebut, terdapat beberapa tantangan yang ia temui.

Masuk melalui pemerintah desa dan meminta peta tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat yang terbiasa mengorganisir masyarakat di desanya masing-masing menjadi langkah yang ditempuh Ridho di awal pendampingannya di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba.

Sayangnya, saat itu pekerja sosial dan pengurus organisasi lembaga desa yang diharapkan bergabung tengah disibukkan oleh pekerjaan masing-masing. Sehingga Ridho tak bisa dipertemukan dengan mereka. Beruntung Ridho mengenal sosok pemuda desa yang selanjutnya mengajak anggota pemudanya untuk menggelar kegiatan peresmian LSD Wanasaba.

Ia kemudian kedatangan para pekerja sosial desa yang terdiri dari kader posyandu dan penggerak program desa lainnya pada saat meluncurkan program LSD di Kantor Desa Wanasaba. Dari sana, lahirlah nama-nama pengurus LSD yang bertahan sampai sekarang.

Pendampingan yang dilakukan Ridho di LSD Wanasaba terbilang tidak menemui terlalu banyak tantangan. Di mana sumber daya yang ia temui sudah memiliki pengalaman dalam mengerjakan kerja-kerja advokasi pekerja migran dari program LSM lainnya. Kondisi kesadaran sumber daya LSD Wanasaba juga terbilang cukup maju. Mengingat pengalaman mereka dengan LSM sebelumnya.

Kendati demikian, apa yang dicanangkan oleh ADBMI berupa pemanfaatan struktur sosial dinilai memiliki perbedaan dari kerja-kerja LSM sebelumnya. Ridho dapat melihat kekurangan yang dimiliki sumber daya LSD Wanasaba di awal berjalannya program tersebut.

Sebagian besar anggota LSD Wanasaba merupakan mantan PMI dan hampir seluruhnya merupakan keluarga PMI. Hal itu menjadi modal awal yang terus dimaksimalkan dalam melakukan pendampingan. Belakangan Ridho menemukan sejumlah tantangan yang ditemui dalam membesarkan LSD Wanasaba.

Tantangan tersebut berupa sumber daya LSD Wanasaba yang belum memahami dengan baik cara memberdayakan organisasi, menyusun program, sampai dengan melakukan kerja-kerja advokasi. Selain itu belum ada pemahaman pada diri anggota LSD Wanasaba dalam menghidupi secara mandiri organisasi mereka.

Sama seperti Wanasaba, di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Ridho juga masuk melalui pemerintah desa. Melalui pemerintah desa ia diarahkan untuk menemui karang taruna. Namun dalam prosesnya, ia tak mendapatkan respon baik. Karena persoalan *image* LSM yang dinilai merupakan program yang bersifat instan dan tidak berkelanjutan.

Tidak patah arang, Ridho mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan observasi mendalam. Ia sampai melaksanakan salat jumat berjamaah di Desa Anjani. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan

informasi mengenai kelompok atau organisasi pemuda yang bisa didekati.

Usaha Ridho membuahkan hasil. Dari masjid, ia mendapatkan informasi tentang adanya kelompok pecinta alam bernama gema lestari. Dari sanalah ia menemukan para perintis LSD Anjani. Setelah itu, muncul anggota lain dari unsur kader posyandu, dan pekerja sosial desa di lingkup pemerintah desa Anjani lainnya.

Berbeda dengan Wanasaba, anggota LSD Anjani terdiri dari anggota yang didominasi oleh generasi milenial. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan tokoh pemuda desa lainnya. Beberapa di antara mereka merupakan mantan PMI. Ridho bahkan mencatat sebagian besar dari mereka adalah mantan PMI.

Kapasitas SDM anggota LSD Anjani di awal berdirinya terbilang minus. Mereka sama sekali tidak memiliki gambaran tentang pekerja migran dan kerja-kerja advokasi, juga pendampingan dan penanganan kasus. Namun Ridho melakukan pendekatan dengan menyentuh langsung persoalan yang mereka hadapi. Sebagai mantan PMI, mereka memiliki kesadaran yang lebih untuk berbuat dan membesarkan LSD mereka.

Fauzan di Desa Ketapang Raya dan Suradadi

Fauzan bergabung dengan ADBMI pada tahun 2016. Dua tahun setelah menjalankan sejumlah program di ADBMI, Fauzan dipercaya sebagai pendamping lapangan dalam program.

Fauzan yang lahir di Lepak, 27 Maret 1976 itu merupakan seorang mantan PMI. Dengan latar belakang itulah, ia begitu semangat dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Menurutnya, menjalankan program ADBMI merupakan waktu dan kesempatan yang tepat

untuk dapat membantu dan berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak PMI yang selama ini terabaikan. Terutama agar bagaimana ia dapat membantu warga di desa dampingan program menjadi PMI yang pergi baik, pulang selamat dan sejahtera.



Fauzan lahir di Lepak, 27 Maret 1976. Dengan latar belakang seorang mantan PMI, ia begitu semangat melakukan kerja-kerja advokasi.

Namun untuk mencapai harapan besar tersebut, ia mendapatkan sejumlah tantangan. Persoalan awal yang Fauzan temukan di awal pembentukan LSD adalah kesulitan menemukan masyarakat yang sadar dan memahami kerja-kerja sosial. Terutama kerja-kerja LSM yang memang dipengaruhi oleh citra buruk LSM yang mulai mengakar dan tumbuh subur di tengah masyarakat.

Selain itu, Fauzan juga menemukan persoalan tentang masih rendahnya sifat kepedulian pemerintah desa mulai dari level kepala desa sampai RT soal isu-isu pekerja migran. Bahkan tidak hanya di tingkatan pemerintah desa, kepedulian tersebut juga dinilai Fauzan

masih rendah di level pemerintah kabupaten dan provinsi.

Lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi di lintas stakeholder wabilkhusus terhadap persoalan-persoalan PMI di Kabupaten Lombok Timur juga menjadi tantangan tersendiri dalam kerja pendampingan yang dilakukannya. Salah satu yang membekas di diri Fauzan adalah soal penanganan kasus penipuan, TPPO, pemulangan jenazah maupun persoalan PMI lainnya.

Semua tantangan tersebut diatasi dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, ia juga berupaya meningkatkan posisi tawarnya dengan terus menunjukkan kerja-kerja advokasi pekerja migran.

Widya Kuswatun Harwin di Desa Pringgasela Timur

Widya mulai bergabung dengan ADBMI pada tahun 2012. Perempuan kelahiran 1989 itu mengaku mendapatkan tugas yang cukup berat saat pertama kali ditugaskan menjadi pendamping lapangan. Bagi dia, tidak mudah bagi seorang perempuan berjilbab untuk dengan mudah berbaur dan akrab duduk bersama tokoh masyarakat dan desa yang didominasi laki-laki.

Ia yang akrab disapa Widi juga merasa tidak mudah untuk membangun persona sebagai aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah masyarakat yang budaya patriarkinya masih kental. Di sisi lain, secara pribadi ia belum begitu meyakini jika dirinya secara personal mampu menjadi pendamping dalam program pemberdayaan dengan keharusan dapat memengaruhi orang lain untuk melangkah ke arah perubahan.

Atas kesadaran itu, ia meyakini jika sudah barang tentu pekerjaan mendampingi Lembaga Sosial Desa (LSD) di Desa Pringgasela

Timur, Kecamatan Pringgasela akan mendapatkan banyak tantangan. Baik dari masyarakat maupun dari internalnya sendiri. Namun semua hal negatif tadi dapat ia atas dengan meyakini pekerjaan sebagai ruang belajar. Bahwa setiap tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru yang bisa jadi tidak datang dua kali dalam hidupnya.

Kepercayaan diri Widi menjadi pendamping lapangan LSD juga setidaknya ada dari pengalamannya sebagai pendamping desa di proyek ADBMI tahun sebelumnya. Itulah mengapa ia menjalani kepercayaan yang diberikan padanya itu dengan hati yang terbuka.

Pengalaman sebagai keluarga PMI juga menjadi bekal tersendiri bagi Widi. Seperti Ridho dan Fauzan di empat desa dampingan program, Widi juga mengawali pendampingannya melalui pemerintah desa. Tak juga jauh berbeda dari dua pendamping lapangan sebelumnya, Widi menemukan persoalan awal dalam menemukan para perintis LSD di Pringgasela Timur.



Widya Kuswatun Harwin, akrab disapa Widi, merasa tidak mudah untuk membangun persona sebagai aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah masyarakat yang budaya patriarkinya masih kental.

Ia menceritakan bagaimana pemerintah desa saat itu masih kental dengan sisa aroma politik pemilihan kepala desa. Di mana ada keterbelahan yang tidak secara langsung dibuka, namun berpengaruh di awal masuknya program tersebut. Selain itu, Widi juga membaca Pringgasela Timur sebagai desa yang menjadi lumbung para penyalur PMI. Bahkan bukan sekedar pekerja lapangan perusahaan penyalur, namun bahkan tempat beberapa cabang perusahaan.

Selain itu, Widi juga menilai adanya tantangan atas stigma buruk masyarakat terhadap LSM. Hal ini juga sejurus dengan tantangan awal yang ia hadapi saat pertama kali mencari anggota LSD Pringgasela Timur.

Dijelaskan, tantangan utama pendampingan adalah bagaimana menemukan sosok-sosok yang memiliki mampu atau dirasa memiliki beberapa syarat sebagai anggota LSD ADBMI. Pertama sosok itu harus merupakan tokoh atau berpotensi menjadi tokoh di desa tersebut. Kedua ia memiliki ketertarikan pada isu PMI, loyalitas cukup tinggi, mampu berorganisasi atau bekerja dalam tim, dan mampu beradaptasi dengan situasi politik desa.

Kriteria selanjutnya adalah berkomitmen untuk memperjuangkan isu PMI, bekerja sosial atau tidak berorientasi pada uang alias setidaknya sudah tidak memiliki permasalahan secara finansial. Hal ini penting agar nantinya anggota tidak meninggalkan LSD menjadi PMI.

Bagi Widi, tentu saja kriteria tersebut terlalu sempurna. Sehingga hampir mustahil untuk menemukan paket komplit. Namun setidaknya satu atau dua kriteria tersebut akhirnya ada pada sejumlah orang yang kemudian bergabung menjadi anggota LSD Pringgasela Timur.

Salah satu yang menarik dari pendampingan Widi di Pringgasela

Timur adalah kesadaran dan pengetahuan anggota yang masih minim tentang advokasi PMI. Namun tidak sulit untuk membangkitkan kesadaran tersebut karena sebagian besar dari mereka merupakan keluarga PMI. Bahkan ada juga dari mereka yang justru merupakan mantan PMI dan yang keluarganya mengalami persoalan di negeri rantauan saat bekerja menjadi pahlawan devisa negara.

TO

**Gambaran Sejumlah Tantangan
dan Upaya Mengatasinya**

BEDA DESA, BEDA CARA

DI AWAL pembentukannya, program ADBMI di lima desa dampingan menghadapi beragam tantangan yang berbeda, dengan setiap tantangan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang

berbeda pula. Dari segi budaya dan aspek sosial ekonomi, setiap desa memiliki masalah yang beragam. Perbedaan kultural dan struktur sosial ekonomi antara desa-desa yang berbeda jarak geografisnya menjadi kunci penting. Misalnya, budaya masyarakat di daerah pesisir yang berdekatan dengan pantai akan sangat berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan atau pun di kota. Perbedaan latar belakang inilah yang menjadi keunikan dan tantangan tersendiri dalam mendampingi kelima desa dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda.

Dalam program kerjasama ADBMI dan AWO International sejak tahun 2018, Desa Ketapang Raya di Kecamatan Keruak, Kabupaten

Perbedaan latar belakang inilah yang menjadi keunikan dan tantangan tersendiri dalam mendampingi kelima desa dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda.

Lombok Timur dipilih sebagai desa dampingan yang berada di wilayah pesisir pantai. Desa ini, yang dulunya merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Luar, berbatasan langsung dengan Kecamatan Jerowaru. Sebagai desa di tepi pantai selatan, Ketapang Raya telah berkembang menjadi destinasi wisata yang memanfaatkan potensi alamnya, terutama pantai yang terkenal dengan nama pantai Lungkak.

Umumnya, masyarakat pesisir memiliki karakter yang tangguh dan terbuka. Hal ini menjadi tantangan bagi ADBMI dan LSD Ketapang Raya yang menjadi representasi ADBMI di tingkat desa, dalam mengadvokasi isu-isu terkait pekerja migran, perlindungan perempuan, dan anak-anak di lingkungan tersebut.



Sebagai desa di tepi pantai, Ketapang Raya telah berkembang menjadi destinasi wisata yang memanfaatkan potensi alamnya.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 310 jiwa dari total 3.954 jiwa penduduk Desa Ketapang Raya, atau sekitar 13 persen, memilih untuk menjadi pekerja migran. Hal ini menarik perhatian

karena secara alamiah, penduduk di wilayah pesisir pantai sering kali memilih profesi sebagai nelayan dan mengandalkan sumber daya alam dari laut. Hasil pendataan Lembaga Sosial Desa (LSD) Ketapang Raya menunjukkan bahwa hampir separuh dari total pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah tersebut adalah perempuan.

Angka tingginya jumlah pekerja migran perempuan ternyata sejalan dengan kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Terdapat permasalahan serius terkait kasus pernikahan dini, terutama di Desa Ketapang Raya. Data dari lima desa dampingan ADBMI menunjukkan terdapat sekitar 46 kasus pernikahan dini antara tahun 2021 hingga 2023, di mana Desa Ketapang Raya memiliki angka kasus yang tinggi. LSD juga mencatat sebanyak 40 kasus pernikahan dini di keluarga PMI.

Dengan karakteristik masyarakat pesisir yang tangguh, LSD dihadapkan pada tantangan dalam melakukan advokasi, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya terkait isu-isu seperti ini.

Berbeda dengan masyarakat pesisir pantai yang cenderung tangguh dan terbuka, masyarakat yang berada di daerah kaki gunung memiliki karakteristik yang lebih tenang namun cenderung tertutup. Faktor geografis dan latar belakang sosio-kultural telah membentuk karakteristik ini secara berkelanjutan. Jika dibandingkan, perbandingan antara masyarakat Desa Ketapang Raya di Kecamatan Keruak dan Desa Pringgasela Timur di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di Desa Pringgasela Timur berjumlah 255 dari total 3.111 jiwa penduduk desa tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 12 persen penduduk Pringgasela Timur memilih menjadi PMI,

dengan hanya sekitar 21 pekerja migran perempuan. Mayoritas penduduk Desa Pringgasela Timur cenderung menjadi petani dan masih mengandalkan sumber daya alam di sekitarnya. Selain itu, adanya galian pasir di desa tersebut juga menjadikan sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh kasar.

Tantangan yang dihadapi pengurus LSD Pringgasela Timur terutama berkaitan dengan masalah pernikahan dini. Data dari tahun 2021 menunjukkan terdapat sekitar 14 kasus pernikahan dini di keluarga PMI di Desa Pringgasela Timur. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan keterbatasan komunikasi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan salah satu pihak keluarga untuk menikah secara dini. Selain itu, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih rendah juga turut berperan dalam hal ini. Semua ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh pengurus LSD di Desa Pringgasela Timur.

Pengurus LSD yang didominasi oleh kaum muda sering dihadapkan pada tantangan dalam mengadvokasi kasus, seringkali dianggap "kurang berpengalaman" dalam menangani situasi kehidupan yang terbatas, baik dalam penyelesaian masalah PMI maupun kasus pernikahan dini. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam menavigasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks.

Namun, berbeda halnya dengan Lembaga Sosial Desa (LSD) di Pringgasela Kecamatan Pringgasela yang diisi oleh kaum muda, LSD Wanasaba justru menghadirkan paradigma yang berbeda. Di LSD Wanasaba, mayoritas pengurusnya adalah orang-orang tua. Sebagian besar pengurus LSD ini bahkan adalah orang tua yang memiliki tanggungan keluarga, termasuk anak-anak dan cucu. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. LSD Wanasaba menjadi salah satu lembaga desa yang dijadikan sebagai contoh di Desa Wanasaba

Kecamatan Wanasaba.

Keterlibatan aktif mereka dalam mendampingi kasus-kasus hingga memberdayakan PMI membuat pemerintah desa Wanasaba memberikan anggaran setiap tahunnya bagi LSD Wanasaba. Ini membuktikan bahwa usia atau latar belakang usia tidak selalu menjadi faktor penentu dalam memberikan kontribusi dan kualitas dalam mengelola lembaga sosial di tingkat desa.

Lembaga Sosial Desa (LSD) Wanasaba menunjukkan kemampuan advokasi yang luar biasa di lingkungan masyarakatnya. Pengurus LSD Wanasaba memiliki latar belakang yang beragam dan kompeten, mulai dari guru sekolah, pengusaha, tokoh perempuan yang bergerak dalam advokasi gender, hingga individu yang berperan sebagai pendamping desa. Keberagaman ini memberikan pengaruh yang signifikan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh LSD Wanasaba, yaitu keterbatasan dalam memperluas jaringan untuk menjaga konsistensi dalam kegiatan mereka. Karena dominasi pengurus yang berasal dari generasi tua, LSD Wanasaba mungkin terhambat dalam mengadopsi ekspresi baru, inovasi, dan integrasi digital yang sangat penting dalam era modern saat ini.

Digitalisasi memegang peran penting dalam memperkenalkan lembaga dan komunitas lokal di desa. Penerapan teknologi digital bukan hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menyebarkan informasi, khususnya terkait penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) dan terciptanya migrasi yang aman di era modern ini. Dengan adopsi teknologi ini, LSD dapat mencapai masyarakat lebih luas, termasuk mereka yang berada di luar desa atau desa-desa penyangga, sehingga dampak dari keberadaan komunitas LSD dapat dirasakan oleh semua.

Desa Anjani di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

menunjukkan keberagaman pengurus LSD yang menarik. Sekitar 60 persen pengurus LSD Anjani adalah generasi muda yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan LSD Anjani, termasuk pendampingan serta penanganan kasus terkait PMI dan pernikahan dini. Hal ini menunjukkan keseimbangan dan kontribusi signifikan kaum muda dalam upaya advokasi dan penyelesaian masalah di desa tersebut.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah PMI di Desa Anjani sekitar 509 jiwa dari total 10.999 jiwa penduduk Desa Anjani. Penduduk desa ini memiliki karakteristik yang sangat beragam karena berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Desa Anjani memegang posisi sebagai desa terpadat di Kecamatan Suralaga dan memiliki keunikan yang sangat menonjol. Salah satu keunikan tersebut adalah penggunaan 13 bahasa resmi oleh penduduknya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus LSD Anjani dalam menjalankan tugas mereka.

Berbagai lembaga yang ada di desa dan dusun kadang-kadang memunculkan konflik internal yang signifikan, sehingga pemerintah desa harus memiliki kebijakan yang cerdas untuk mengevaluasi potensi dari setiap lembaga tersebut.

Kehadiran banyak lembaga di bawah naungan pemerintah Desa Anjani mengharuskan pengurus LSD Anjani untuk membangun jejaring yang kuat demi menjaga kelangsungan komunitas mereka. Mereka bekerja sama erat dalam membangun jaringan, baik dalam lingkup personal maupun kelompok. Akibatnya, keberadaan LSD Anjani dapat dianggap lebih menonjol dibandingkan dengan lembaga desa lainnya.

Namun, hal ini juga menyebabkan gesekan, di mana LSD Anjani sering dianggap sebagai "anak favorit" dari pemerintah desa, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara lembaga desa lainnya. Keterlibatan aktif LSD Anjani dalam kegiatan desa membuat

pemerintah desa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga beberapa pengurus LSD memegang peranan yang penting dan strategis dalam administrasi pemerintahan.

Di antara mereka, ada yang bahkan terlibat aktif sebagai pengurus BPD karena keterlibatannya dalam kegiatan sosial di tengah masyarakat. Beberapa juga menjadi kader PKK, mengurus Posyandu, hingga mengelola unit usaha BUMDes di Desa Anjani.

Banyak orang menganggap bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) di desa-desa binaan ADBMI hanya sebagai wadah untuk menjalankan program ADBMI. Namun, sebenarnya LSD terlibat secara menyeluruh dalam memberdayakan masyarakat. Pemahaman ini bisa diubah dengan kinerja yang baik dari para pengurus LSD.

Selain faktor-faktor yang disebutkan, ada juga faktor individu yang menjadi hambatan bagi perkembangan LSD di lima Desa program ADBMI dan AWO International. Banyak dari pengurus LSD memiliki kesibukan di luar LSD yang menghambat keterlibatan mereka sepenuhnya. Faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, atau aspek sosial-politik turut mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kegiatan dan pendampingan LSD.

SOLUSI TERKUNCI KEPENTINGAN

SOLUSI-SOLUSI yang diharapkan untuk menangani masalah pekerja migran di Kabupaten Lombok Timur sering kali terkendala oleh berbagai kepentingan yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghambat proses implementasi program yang efektif. Permasalahan ini sering timbul karena adanya pertentangan kepentingan antara pemerintah daerah, kebijakan nasional, kepentingan bisnis, lembaga keamanan, masyarakat lokal, dan bahkan kelompok eksternal yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap kondisi pekerja migran.

Pertama-tama, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah terkait pekerja migran. Kebijakan nasional mungkin memiliki fokus yang berbeda atau bahkan kontradiktif dengan kebijakan yang diterapkan di tingkat lokal. Hal ini sering menjadi hambatan dalam mengimplementasikan solusi yang terkoordinasi, karena adanya perbedaan pendekatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, kepentingan bisnis dan perusahaan juga memiliki peran penting dalam dinamika ini. Beberapa kepentingan bisnis mungkin lebih condong kepada penekanan biaya dan kesejahteraan perusahaan, sehingga mengabaikan aspek kesejahteraan pekerja



migran. Ini bisa menyebabkan resistensi terhadap perubahan kebijakan yang lebih progresif dan pro-pekerja migran.

Lalu, lembaga keamanan dan peraturan yang ketat dalam proses migrasi juga turut memainkan peran dalam menghambat solusi yang komprehensif. Regulasi yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit, dan biaya yang tinggi sering menjadi rintangan besar bagi para pekerja migran, menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses yang layak ke kesempatan pekerjaan yang aman dan layak di luar negeri.

Tidak ketinggalan, dinamika internal di masyarakat lokal juga bisa menjadi penghalang. Terkadang, stigma dan stereotip negatif terhadap pekerja migran bisa membuat implementasi program perlindungan dan pemberdayaan mereka menjadi sulit dilaksanakan. Masyarakat yang tidak teredukasi tentang hak-hak pekerja migran dan mungkin kurangnya empati terhadap kondisi mereka juga bisa menjadi penghambat utama.

Terakhir, kepentingan kelompok eksternal seperti LSM atau

organisasi hak asasi manusia seringkali memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani isu pekerja migran. Hal ini bisa menciptakan kesulitan dalam mencapai konsensus untuk mengadopsi pendekatan yang efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran.

Mengatasi kepentingan yang bertentangan ini memerlukan upaya koordinasi, komunikasi, dan negosiasi yang intensif di antara semua pihak yang terlibat. Diperlukan juga kesediaan untuk berkolaborasi, menciptakan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, serta kesadaran akan urgensi dan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. Dengan demikian, solusi yang lebih komprehensif dan efektif dapat diimplementasikan untuk mendukung kondisi pekerja migran di Kabupaten Lombok Timur.

MERINTIS LSD

BERBICARA TENTANG pembangunan masyarakat desa, Yayasan ADBMI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu-isu pembangunan desa. ADBMI mendorong partisipasi masyarakat desa dalam memberikan kontribusi dan pemikiran mereka untuk meningkatkan kemajuan desa.



Sejak awal berdirinya, Yayasan ADBMI telah terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat desa, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga mereka. ADBMI berupaya mewujudkan migrasi yang aman bagi masyarakat desa.

Dalam pembicaraan singkat dengan Roma Hidayat, Ketua Yayasan Advokasi Pekerja migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur, ia menjelaskan landasan pembentukan Lembaga Sosial Desa di desa-desa yang bekerja sama dengan yayasan, dikenal luas dengan akronim ADBMI. Lembaga Sosial Desa yang identik dengan komunitas desa yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan PMI beserta keluarga telah berdiri di setiap desa yang bermitra dengan ADBMI, termasuk di lima desa yang menjadi bagian program ADBMI dan AWO International sejak tahun 2018.

LSD lahir sebagai perwujudan ADBMI – versi kecil dari ADBMI di tingkat desa. Mereka terlibat dalam memberikan perlindungan hingga reintegrasi bagi PMI dan keluarganya.

KENAPA LSD?

LEMBAGA SOSIAL Desa adalah sebuah entitas yang didorong oleh semangat gotong royong, dengan masyarakat desa menjadi pendorong utamanya, melibatkan berbagai elemen seperti pemuda, orang tua, laki-laki, dan perempuan yang turut terlibat dalam prosesnya. Di dalam LSD, prinsip kesetaraan dijunjung tinggi tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. LSD beroperasi dengan semangat kebersamaan yang mendorong kesadaran dan kepedulian murni, tanpa campur tangan politik maupun kecenderungan untuk dipolitisasi sebagai sebuah organisasi.

LSD didirikan sebagai lembaga di tingkat desa yang fokus pada isu-isu pekerja migran, perempuan, dan anak-anak. Mereka turut serta dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan desa. Meskipun sering kali dianggap sebagai entitas yang diawasi oleh ADBMI, pengurus LSD telah membuktikan eksistensinya melalui berbagai inisiatif sosial yang efektif. Mereka bahkan menjalin kemitraan dengan pemerintah desa untuk menangani masalah sosial di wilayah mereka, sambil mempertahankan posisi yang solid di tengah-tengah masyarakat.



LSD turut serta dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan desa.

LSD bukan sekadar lembaga yang hanya memperhatikan isu-isu pekerja migran Indonesia, melainkan juga menjadi bagian solusi dalam menangani permasalahan sosial yang ada di desa. LSD menjelma menjadi jembatan penting yang menghubungkan dan mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis di wilayah desa.

MEMBANGUN KEKUATAN LSD

PENGUATAN KAPASITAS LSD merupakan langkah kunci dalam upaya perlindungan dan pendampingan bagi pekerja migran di wilayah Lombok Timur. Program ini terfokus pada pelaksanaan workshop, seminar, dan sesi pelatihan rutin bagi anggota LSD. Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan anggota terkait isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran, termasuk hak-hak mereka, permasalahan hukum, kondisi sosial, dan keterampilan pendampingan yang diperlukan.

Sesi pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memfokuskan pada pengembangan keterampilan interpersonal, komunikasi, konseling, dan manajemen proyek. Anggota LSD diberdayakan untuk memahami lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran, seperti ketidakpastian hukum, eksploitasi, permasalahan kesehatan mental, dan isu-isu sosial lainnya.

Selain itu, sesi-sesi ini juga membangun keterampilan membangun jaringan, bekerja sama dengan lembaga pemerintahan,

serta memahami mekanisme kerja sama lintas sektor. Melalui peningkatan kapasitas ini, anggota LSD diharapkan mampu mengidentifikasi, menangani, dan memberikan solusi yang efektif untuk tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran di wilayah mereka.



Kegiatan penguatan kapasitas LSD ini bukan hanya terfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan pemikiran yang inklusif, berempati, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan sesi pembinaan kepemimpinan, pengembangan wawasan mengenai hak asasi manusia, dan pentingnya peningkatan kesadaran sosial di kalangan anggota LSD. Dengan demikian, anggota LSD akan menjadi agen perubahan yang berpengaruh secara positif bagi perlindungan dan

kesejahteraan pekerja migran di Lombok Timur.

ADBMI berfokus pada penguatan kapasitas LSD. Hal ini secara umum meliputi penguatan kerja pelayanan dan peningkatan manajemen organisasi.

Kekuatan Kerja Pelayanan

LSD di lima desa dampingan program seperti yang telah dijelaskan berfokus pada memaksimalkan peran masyarakat dalam melayani sesama masyarakat. Karena itu, LSD diharapkan dapat menguatkan perannya dalam kerja-kerja pelayanan tersebut. Hal ini nantinya juga yang akan menjadi auto kritik pada pemerintah desa.

Salah satu upaya penguatan kerja-kerja pelayanan dilakukan dengan melatih LSD dalam memetakan masalah pekerja migran. Hal itu merupakan fase strategis dalam program yang melibatkan serangkaian kegiatan survei dan penelitian lapangan yang cermat.

Anggota LSD yang didampingi para ahli dari akademisi dan praktisi bersama-sama melakukan pemetaan masalah pekerja migran di desanya masing-masing. Melalui proses tersebut, setiap aspek kehidupan pekerja migran diselidiki, baik dari segi kebutuhan dasar, masalah hukum, ketersediaan akses layanan kesehatan, hingga faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka.

Identifikasi masalah-masalah yang spesifik dan menyeluruh menjadi landasan utama untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan yang dihadapi.

Hasil dari pemetaan masalah ini memberikan wawasan mendalam dan data yang sangat berguna. Informasi yang diperoleh memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang situasi dan

permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran, sekaligus membantu merumuskan solusi-solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Selain itu, pemetaan ini menjadi dasar utama dalam perencanaan program, memungkinkan penyusunan strategi dan tindakan yang lebih terfokus dan terukur dalam menangani permasalahan pekerja migran secara lebih komprehensif.

Pemetaan Masalah Pekerja migran: Proses pemetaan masalah dilakukan untuk merumuskan program penanganan yang relevan. Berikut sejumlah poin yang dilakukan dalam tahapan pemetaan masalah pekerja migran.

1. Identifikasi Masalah Utama

LSD bekerja sama dengan anggota masyarakat dan kelompok terkait untuk mengidentifikasi beragam masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, seperti perlakuan tidak adil di tempat kerja, masalah hukum, kesehatan, atau masalah sosial lainnya.

2. Analisis Data dan Informasi

Data-data yang terkumpul dari survei, wawancara, atau pertemuan kelompok dipelajari secara lebih mendalam untuk memahami akar permasalahan, dampaknya, dan pola yang mungkin terjadi.

3. Prioritisasi Masalah

Berdasarkan analisis tersebut, masalah-masalah yang teridentifikasi diprioritaskan. LSD dan anggota masyarakat menentukan

masalah mana yang perlu mendapatkan perhatian utama berdasarkan urgensi, dampak, dan ketersediaan sumber daya.

4. Penyusunan Rencana Tindakan

Setelah identifikasi dan prioritas masalah, LSD mengembangkan rencana tindakan yang jelas dan terstruktur untuk menangani masalah-masalah tersebut. Rencana ini mencakup langkah-langkah spesifik, sumber daya yang diperlukan, serta tahapan pelaksanaannya.

5. Konsultasi dan Validasi

Rencana tindakan yang disusun diperiksa ulang oleh masyarakat, pekerja migran, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa masalah yang dipetakan dan rencana tindakan yang dibuat adalah representatif dan relevan dengan kebutuhan sebenarnya. Hal ini juga untuk memperoleh dukungan dan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat setempat.

6. Pelaksanaan dan Pemantauan

Setelah validasi, LSD mulai melaksanakan rencana tindakan tersebut dan terus memantau perkembangannya. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan.

Selanjutnya, penanganan masalah Pekerja migran merupakan tahapan penting setelah pemetaan masalah dilakukan. Dalam fase ini, berbagai program dan kegiatan spesifik dirancang dan

diimplementasikan untuk menangani permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Penanganan masalah ini mengacu pada langkah-langkah nyata yang diambil untuk memberikan solusi dan dukungan kepada pekerja migran yang menghadapi berbagai tantangan. Ini mungkin termasuk pengaturan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendampingan dalam proses administrasi atau legalitas di negara tujuan, memberikan informasi yang lebih baik terkait hak-hak mereka, serta menyediakan bantuan psikologis atau sosial bagi mereka yang memerlukan.

Setiap solusi atau program yang dijalankan dalam penanganan masalah pekerja migran haruslah sesuai dengan masalah yang ditemukan dan dapat memberikan manfaat yang nyata. Oleh karena itu, setelah permasalahan identifikasi, program ini didesain dengan tujuan memberikan bantuan dan dukungan konkret kepada pekerja migran, memperbaiki kondisi mereka, serta meningkatkan kualitas hidup mereka baik di negara asal maupun di tempat tujuan.

Selain itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting di sini. Program-program ini tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat, untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari program ini. Dengan demikian, penanganan masalah pekerja migran tidak hanya menjadi respons akut terhadap masalah, tetapi juga langkah progresif dalam memperbaiki kondisi mereka secara menyeluruh.

Peningkatan Manajemen Organisasi

Selanjutnya selain menguatkan pelayanan LSD, ADBMI juga berupaya menguatkan manajemen organisasi dengan berbagai kegiatan pelatihan. Salah satunya menguatkan kekuatan struktur organisasi.

Sebuah unit khusus didirikan dalam LSD untuk mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan laporan rutin. Tim ini mengumpulkan data relevan, menganalisis perkembangan, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan layanan dan kebijakan yang ada. Laporan-laporan ini menjadi alat penting untuk evaluasi internal dan mendapatkan dukungan dari stakeholder eksternal.

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pendampingan pembuatan laporan meliputi:

1. Pengumpulan Data yang Terstruktur

Menggunakan teknik survei, wawancara, atau alat pemetaan yang lebih canggih untuk memperoleh data yang terperinci dan terstruktur tentang kondisi pekerja migran.

2. Analisis yang Mendalam

Selain data, melibatkan tim untuk menganalisis informasi ini dengan lebih mendalam. Ini membantu memahami penyebab akar dari masalah yang dihadapi dan menemukan pola yang berguna untuk perbaikan.

3. Rekomendasi Berbasis Data

Menghasilkan rekomendasi yang konkret dan praktis berdasarkan temuan dari data yang dikumpulkan. Ini akan membantu mendukung perbaikan layanan dan kebijakan di

lapangan.

4. Pelatihan dan Bimbingan

Mengadakan pelatihan reguler dan sesi bimbingan bagi anggota tim yang terlibat dalam penyusunan laporan. Ini membantu meningkatkan keterampilan analisis dan presentasi mereka.

5. Komunikasi yang Efektif

Menyatukan informasi dari laporan-laporan tersebut ke dalam format yang mudah dipahami dan diserap oleh semua pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, LSD dapat meningkatkan kualitas laporan mereka, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan program dan meningkatkan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Regenerasi

"Regenerasi," dalam konteks ini, mengacu pada proses pembaruan dan pergantian kepemimpinan serta anggota dari Lembaga Sosial Desa (LSD) secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan program dan memastikan kesinambungan upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan melindungi pekerja migran.

Proses regenerasi ini mencakup langkah-langkah seperti identifikasi, pelatihan, dan pengembangan kader-kader baru yang siap mengambil alih peran dalam LSD. Membuka kesempatan bagi individu-individu yang baru untuk bergabung dan berkontribusi

dalam LSD adalah langkah kunci dalam memperbarui dan memperkuat LSM atau lembaga sosial yang terlibat dalam melindungi pekerja migran.

Pergantian kepemimpinan juga menjadi bagian integral dari regenerasi. Ini mencakup penyerahan tanggung jawab dari para pemimpin lama ke generasi baru yang memiliki semangat, ide-ide segar, dan komitmen yang sama dalam menangani isu pekerja migran. Pelatihan dan pembinaan kepemimpinan juga perlu dilakukan untuk mempersiapkan para pemimpin baru menghadapi tantangan dan tugas yang kompleks.

Regenerasi tidak hanya tentang perubahan dalam kepemimpinan, tetapi juga tentang revitalisasi semangat dan komitmen untuk terus bergerak maju. Hal ini memungkinkan LSD untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, masalah baru yang muncul, serta kebutuhan yang berubah dari pekerja migran dan masyarakat sekitarnya. Regenerasi yang baik akan menjaga keberlanjutan program dan memastikan keberlangsungan upaya perlindungan terhadap pekerja migran secara efektif dan berkelanjutan.

Lahirnya Kepercayaan Diri LSD

Keberhasilan peningkatan kapasitas LSD tercermin dalam peningkatan kepercayaan diri anggotanya.

Terdapat kesuksesan yang signifikan dalam upaya peningkatan kapasitas LSD yang tercermin dalam tingkat kepercayaan diri anggotanya. Sebelumnya, anggota LSD mungkin merasa kurang yakin untuk berperan aktif dalam menangani masalah pekerja migran. Namun, setelah melalui program-program peningkatan

kapasitas, mereka kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran serta keterampilan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berarti.

Kepercayaan diri yang meningkat ini tercermin dalam partisipasi aktif anggota LSD dalam berbagai kegiatan sosial dan advokasi yang berhubungan dengan isu pekerja migran. Mereka lebih percaya diri dalam berbicara di hadapan masyarakat, berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, serta menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak pekerja migran. Dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, mereka lebih mampu mempengaruhi opini publik, merumuskan solusi, serta mendorong perubahan positif dalam perlakuan terhadap pekerja migran.

Kepercayaan diri yang diperoleh melalui peningkatan kapasitas ini menjadi fondasi yang kokoh bagi LSD dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini juga menjadi bukti bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas individu dan kelompok sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Harapan Bersama

Terdapat banyak harapan terhadap peran Lembaga Sosial Desa agar terus konsisten dalam memberikan manfaat yang semakin luas. Harapan akan kemandirian LSD menjadi fokus utama yang diinginkan bersama. Kemandirian secara institusional dan individual menjadi hal yang diharapkan. Pengurus LSD diharapkan memiliki sumber penghasilan yang stabil agar dapat mempertahankan idealisme mereka dalam advokasi isu pekerja migran Indonesia.

Kedepannya, LSD diharapkan mampu dikelola secara profesional. Bukan sekadar menjadi bawahan dari ADBMI, melainkan menjadi mitra kerja sama sosial bagi ADBMI dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, keberadaan LSD dapat dipertahankan hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

Harapan lainnya adalah terkait dengan LSD yang mendorong migrasi yang sesuai prosedur. LSD tidak melarang migrasi, tetapi mendorong pekerja migran dan calon PMI agar berangkat sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah agar persoalan dokumen, pembayaran gaji, dan jaminan keselamatan dapat diakses dengan baik.

Selain itu, harapan lainnya adalah bahwa LSD dapat menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menjadi referensi bagi komunitas lokal dan mendorong pemerintah desa untuk lebih memperhatikan isu pekerja migran Indonesia. LSD diharapkan dapat memberikan perlindungan dan akses informasi hingga reintegrasi secara massif.

Seringkali, aktivis sosial menghadapi ketidakseimbangan antara kinerja sosial dan tuntutan ekonomi yang seringkali mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan pada tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga sosial desa ini untuk memiliki akses jejaring dan pengelolaan yang profesional, yang dapat memberikan pengurus LSD sumber pendapatan mandiri di masing-masing desa.

Cerita pengalaman dari para pengurus LSD di setiap desa sangat luar biasa. Mereka bekerja tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan dari keluarga PMI yang mereka bantu. Namun, keberadaan mereka seringkali dianggap biasa saja. Mereka hanyalah bagian kecil dari masyarakat desa yang memiliki keahlian dalam menangani kasus PMI.

Pengurus LSD seolah menjadi pahlawan tanpa pujian. Mereka jarang mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Untuk mempertahankan mereka sebagai pahlawan lokal yang berjuang dalam memberikan manfaat, perlu adanya apresiasi sederhana untuk meningkatkan kinerja mereka.

Terkait dengan kebutuhan akan apresiasi terhadap pengurus LSD, hal ini menjadi sangat penting. Menghargai kontribusi dan dedikasi mereka akan memotivasi para pengurus untuk terus memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas mereka. Apresiasi sederhana seperti pengakuan atas peran mereka, ucapan terima kasih, atau bahkan pengaturan program penghargaan dapat menjadi dorongan besar bagi mereka.

Ketika kebaikan dan upaya keras seseorang diakui, hal itu dapat meningkatkan semangat dan memberikan dorongan positif yang luar biasa. Dengan memberikan apresiasi yang pantas kepada para pengurus LSD, masyarakat dapat secara langsung memberikan dukungan dan memperkuat motivasi mereka dalam memperjuangkan isu-isu yang mereka perhatikan. Dalam konteks ini, memberikan apresiasi bukan hanya sekadar penghormatan, tetapi juga bentuk investasi dalam kelangsungan upaya mereka untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

PLUS

**Cerita Keberhasilan Program dan
Kemenangan-Kemenangan Advokasi**

POTRET PERUBAHAN LSD:

Jika ia tak berubah, maka nasib dirinya dan kaumnya tak akan berubah. Yusuf Alaihissalam secara sadar dan kritis bernetamorfosis menjadi ratu adil, pemimpin perubahan. Tak terbayangkan kengerian peradaban, kematian banyak orang oleh bencana kelaparan dan kemarau panjang jika ia diam seperti semula. Dan sejarah menulis semua itu dengan tinta merahnya sebagai kesalahan Yusuf karena tak tampil menjadi pemimpin di saat situasi membutuhkan dirinya. Dan ia menolak misi utama kekhlifahan.

MELALUI SERANGKAIAN proses yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, program Yayasan ADBMI dan AWO International dalam mengembangkan komunitas pekerja migran memperlihatkan capaian yang signifikan sejak tahun 2018. Pencapaian luar biasa telah terlihat di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Ketapang Raya, Kecamatan Ketapang Raya,

dan di Desa Suradadi, Kecamatan Terara. Setiap desa dan LSD menunjukkan pencapaian yang signifikan, baik pada individu anggota LSD, maupun LSD itu sendiri sebagai sebuah kelompok masyarakat.

Selain pada LSD, perubahan juga terjadi secara signifikan di lingkup masyarakat dan pemerintah desa. Capaian ini menunjukkan program ADBMI telah memberikan manfaat yang sangat berarti bagi keberadaan LSD di lima desa.

A. Perubahan Individu

Kelahiran para perintis perubahan melalui kehadiran Lembaga Sosial Desa (LSD) di lima desa program menawarkan kisah-kisah yang menginspirasi, menggambarkan perjalanan dan perubahan yang dialami oleh anggota LSD.

Di antara kisah-kisah inspiratif itu, terdapat pengalaman menarik yang mengungkap bagaimana mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut berperan aktif dalam LSD. Kisah-kisah ini mencerminkan perjalanan emosional, pencerahan, dan perubahan sikap para anggota LSD yang baru bergabung, serta bagaimana mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam LSD.

Salah satu cerita yang menarik adalah bagaimana seorang mantan PMI bertransformasi menjadi agen perubahan yang kini berperan aktif dalam LSD. Pengalaman pekerja migran ini telah menjadi inspirasi bagi mereka yang bergabung dalam LSD. Cerita tentang perjuangan, tantangan, dan perasaan kesulitan yang dihadapi oleh mantan PMI, bersama dengan keberhasilan dan perubahan positif yang dia alami sejak bergabung dengan LSD, mengilhami anggota lainnya.

Selain itu, cerita pengalaman bergabungnya anggota LSD yang baru juga sangat menarik. Mereka yang awalnya ragu atau belum sepenuhnya memahami peran LSD, kini telah menjadi bagian integral dari lembaga ini. Kisah-kisah mereka mencerminkan perubahan dari ketidakpastian menjadi keyakinan yang semakin kuat, dari ketidaktahuan menjadi pemahaman mendalam tentang peran dan tujuan LSD dalam memperjuangkan kepentingan pekerja migran.

Perjalanan emosional yang dialami anggota LSD, baik yang berasal dari pengalaman pekerja migran maupun yang baru bergabung, menjadi sebuah kisah pembelajaran bagi individu dalam ikatan komunitas. Dari perjuangan pribadi hingga pengalaman bersama dalam mewujudkan misi LSD, kisah-kisah ini menggambarkan semangat, ketekunan, dan dedikasi yang membangun fondasi perubahan positif dalam upaya menangani persoalan pekerja migran.

Kisah-kisah perjalanan anggota LSD menjadi bukti bahwa perubahan yang diinginkan dapat dicapai dengan langkah-langkah konkret dan dukungan komunitas. Mereka bukan hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak yang memajukan LSD sebagai lembaga yang kini berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan demi kepentingan pekerja migran.

Kisah-kisah yang terungkap di balik peran Lembaga Sosial Desa (LSD) menyoroti berbagai aspek penting yang menjadi inti dari perjuangan menangani isu pekerja migran di wilayah tersebut. Di antara beragam aspek yang muncul, pemberdayaan, perjuangan melawan hambatan, serta langkah-langkah konkret menjadi sorotan utama.

Beberapa pengurus LSD telah berhasil memanfaatkan isu pekerja migran sebagai daya tarik untuk meraih kesempatan kerja. Salah

satunya adalah Muhammad Sapoan dari Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Sapoan, yang dahulu menjabat sebagai ketua LSD di desanya, kemudian menjadi pendamping lokal di program yang diinisiasi oleh Kementerian Desa.

Pengalaman Sapoan dalam menangani berbagai kasus, mulai dari membantu keluarga korban hingga menyelesaikan masalah-masalah melalui LSD, menjadi motivasinya untuk terlibat sebagai pendamping desa di kecamatan Wanasaba.

Selain Sapoan, ada juga Firman Siddik, seorang pengurus LSD di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Siddik turut serta dalam berbagai kompetisi pemuda dari tingkat kabupaten hingga nasional dengan memperjuangkan isu perlindungan dan pemberdayaan PMI di tingkat desa. Keterlibatannya dalam menangani kasus PMI melalui LSD Anjani dengan ADBMI menjadi pendorongnya untuk memperjuangkan isu PMI di berbagai forum kompetisi.

Berbagai prestasi dan pencapaian signifikan telah diraih oleh para pengurus LSD, selain Muhammad Sapoan dan Firman Siddik, yang merasakan dampaknya secara pribadi. Salah satu contohnya adalah Nendy Wahyu Imansyah, ketua LSD Anjani yang diberikan beberapa tanggung jawab penting oleh pemerintah desa Anjani.

Ia terlibat dalam memimpin beberapa lembaga di bawah naungan desa, termasuk pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Desa Anjani dan Kolam Wisata Mbulan Boroq Dewi Anjani. Keterlibatannya dalam program-program desa dan lembaga non-pemerintah lokal dan nasional menunjukkan kesungguhannya dalam belajar dan berkembang melalui kehadiran LSD.

Para pengurus LSD telah melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan ADBMI bekerja sama dengan AWO International. Pelatihan ini membekali mereka dengan keterampilan

yang diperlukan di lapangan, mulai dari teknik melobi, advokasi, hingga pengumpulan informasi terkait pekerja migran Indonesia. Sejak awal terbentuknya LSD di tingkat desa, para pengurus telah menerima manfaat yang luar biasa dalam memperkuat lembaga mereka dan meningkatkan kapasitas diri.

Kapasitas dan keahlian yang dimiliki para pengurus LSD di tingkat desa terbukti sangat kuat, meskipun mereka hanya merupakan komunitas lokal di tingkat desa. Mereka memiliki pengetahuan teknik fasilitasi untuk mendampingi keluarga PMI dalam mengembangkan usaha mereka sendiri dan melakukan reintegrasi untuk pemberdayaan PMI.

B. Perubahan Kelompok

Sebagai sebuah lembaga di tingkat desa, LSD saat ini telah menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang solid dan kemampuannya dalam menjalankan lembaga tersebut secara mandiri.

Lembaga yang sebelumnya bisa dikatakan dipandang sebelah mata di desa itu kini sudah mampu hadir dan menjadi salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat dan pemerintah desa. Kemandirian LSD juga terlihat dari sejumlah kegiatan yang dilakukan tanpa intervensi ADBMI.

Selama rentang waktu antara 2018 hingga 2022, LSD di lima desa program telah menangani sekitar 137 kasus yang melibatkan PMI. Kasus-kasus ini mencakup berbagai permasalahan, mulai dari dugaan penipuan, kasus kekerasan, hingga persoalan pembayaran gaji yang tak diberikan oleh majikan di negara tempat pekerjaan.

Upaya penanganan yang dijalankan oleh LSD telah memberikan

kontribusi yang sangat berarti dalam menangani persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh pekerja migran di berbagai desa tersebut.

LSD juga secara aktif telah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menangani persoalan pekerja migran. LSD menjadi wahana di mana masyarakat secara aktif terlibat dan diberdayakan untuk merancang solusi-solusi kreatif dalam menangani masalah yang kompleks. Anggota LSD yang merupakan bagian dari masyarakat telah mampu berperan aktif dalam merumuskan solusi yang relevan dan efektif, menunjukkan pentingnya peran mereka dalam upaya penyelesaian penanganan pekerja migran.

Selain itu, LSD juga secara kelompok telah mampu melakukan upaya advokasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan program perlindungan, serta penciptaan solusi inovatif lainnya.

Secara keseluruhan, LSD mengalami perubahan yang signifikan. Mereka dari yang tadinya tidak berdaya dan bahkan menjadi korban sebagai keluarga pekerja migran kini telah memahami pentingnya kolaborasi, kreativitas, dan kesungguhan dalam menangani isu pekerja migran.

Hal ini menegaskan bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak serta komitmen yang kuat untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat pekerja migran dan keluarga mereka.

Fundraising: LSD yang Mandiri Tanpa ADBMI

Sebagai sebuah lembaga, LSD di lima desa dampingan program

juga telah menunjukkan kemandirian mereka. Selain struktur organisasi yang matang, kemandirian LSD juga diperkuat dengan kemampuan mereka dalam menghimpun anggaran atau *fundraising* untuk lembaganya sendiri.

ADBMI sejak awal program telah membekali para anggota LSD di masing-masing untuk dapat memperoleh *fundraising* atau sumber pendanaan secara mandiri. Pengurus LSD sudah mampu menerapkan sejumlah metode dalam mendapatkan sumber pendanaan dari luar ADBMI. Hal itu menjadi keberhasilan yang sangat berarti. Terutama dalam upaya menciptakan organisasi berbasis desa yang kuat secara sosial, serta berdaya secara ekonomi dan diakui keberadaannya secara politik di desa.

Adapun sejumlah sumber pendanaan yang berhasil diterapkan LSD meliputi iuran anggota, anggaran dari dana desa (DD), kerjasama dengan stakeholder terkait di pemerintahan dan perbankan, dan usaha LSD.

1. Iuran Sukarela Anggota

Salah satu sumber dana kegiatan LSD bersumber dari iuran masing-masing anggota. *Sharing* bermakna berbagi atau menyisihkan pendapatan masing-masing anggota untuk diberikan secara sukarela kepada LSD. Tidak ada paksaan dan tidak merasa terpaksa.

Sharing atau iuran sukarela masing-masing anggota LSD biasanya dilakukan oleh pengurus yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Nominalnya pun beragam. Tidak ada patokan secara pasti. Ini lahir dari rasa kesadaran dari anggota sendiri.

Yayasan ADBMI juga memfasilitasi beberapa pengurus LSD untuk bekerja agar memiliki penghasilan tetap. Banyak dari mereka yang bekerja di Koperasi BUMI RAYA.

Ada pula dari mereka yang memiliki usaha dan menjadikan penghasilan dari sumber usahanya itu disisihkan untuk digunakan sebagai *fundraising* LSD di masing-masing desa. Iuran sukarela rutin dilakukan. Ada yang menjadwalkannya setiap per bulan, ada yang per tiga bulan, dan ada juga yang per tahun.

Selain berhasil menggalang dana, kekuatan iuran secara tidak langsung menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki atau tanggung jawab bersama dalam mengembangkan organisasi.

2. Anggaran Dana Desa

Untuk menguatkan posisi LSD secara politik, peraturan desa di upayakan untuk melegalkan keberadaan LSD sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dengan terbitnya perdes tentang perlindungan PMI di tataran desa, secara langsung juga mendorong keterlibatan pemerintah desa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan PMI beserta keluarganya.

Turunan dari Perdes Perlindungan PMI tersebut mengharuskan pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa (DD) dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya. Dikarenakan LSD sudah diatur menjadi LKD dan menjadi satu-satunya lembaga di tataran desa yang memperjuangkan isu PMI, pemerintah desa juga memberikan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemberdayaan PMI yang dikerjakan LSD.

Pendanaan yang diberikan pemerintah desa kepada LSD sudah diberikan setiap tahun. Jumlah yang didapatkan masing-masing LSD

di setiap desa beragam, tergantung dari besaran anggaran DD desa tersebut. Sejauh ini berkisar antara Rp 5 sampai 10 juta per tahun.

3. Membangun Kerjasama

LSD kerap menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta terkait dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan advokasi PMI. Baik di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.

Ketika melakukan reintegrasi setelah penanganan kasus, LSD akan menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM untuk memfasilitasi keluarga PMI dalam membuat usaha sampai dengan legalitasnya.

Bahkan LSD juga mengajak keterlibatan BAZDA atau Badan Amal Zakat Daerah untuk terlibat aktif dalam memberikan dukungan terhadap program-programnya. Sehingga para keluarga PMI juga bisa mengakses bantuan yang bersumber dari zakat masyarakat.

Di samping itu pula, LSD telah menjalin kerjasama dengan perbankan dalam upaya mempermudah akses keluarga PMI untuk mendapatkan modal usaha. Selain mengakses sumber dana dari lembaga pemerintah di tingkat daerah, LSD juga kerap melakukan kerjasama dengan lembaga bertaraf nasional dan bahkan Internasional.

4. Usaha LSD

LSD Anjani merupakan salah satu lembaga yang sudah memiliki beberapa unit usaha dalam menciptakan sumber pendanaan untuk

melangsungkan kehidupan organisasinya.

Mereka sejauh ini memiliki beberapa usaha yang dikelola secara bersama. Sejak tahun 2020, LSD Anjani telah menjalankan sebuah usaha yang bernama UM Keday. UM Keday merupakan akronim dari Usaha Migran Keday. UM Keday ini sampai saat ini sudah memiliki tiga cabang dan akan terus dikembangkan oleh pengurus LSD Anjani.



Sejak tahun 2020, LSD Anjani menjalankan usaha yang bernama UM Keday. UM Keday ini sampai saat ini sudah memiliki tiga cabang dan akan terus dikembangkan.

UM Keday sendiri merupakan sebuah angkringan berupa kedai yang menjual beberapa minuman kekinian. Dengan omzet belasan juta per bulan, UM Keday menjadi salah satu usaha yang bisa berdampak bagi keberadaan LSD Anjani. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSD Anjani tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dana dari UM Keday.

Sampai saat ini, ada puluhan keluarga PMI yang bisa bekerja dan

mencari sumber penghidupan dari UM Keday. Mereka bekerja dan mendapatkan gaji bulanan. Sehingga gaji itu nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Selain itu juga, LSD Anjani menjalankan usaha bank sampah, baik sampah plastik maupun organik. Usaha ini sendiri sudah dijalankan sejak tahun 2022.



Usaha bank sampah LSD Anjani.

Dengan dukungan dana sekitar Rp 1 juta dari LSD Anjani, usaha bank sampah dikembangkan oleh pengurus LSD Anjani. Sampai saat ini, modal yang dijalankan LSD Anjani melalui usaha yang diakomodir oleh TPS 3R Desa Anjani telah menjadi Rp 5 juta.

Melalui TPS 3R Desa Anjani, LSD Anjani semakin kuat secara politik dan sosial serta semakin banyak yang mengenal keberadaannya di desa. TPS 3R Desa Anjani ini sendiri memberikan lapangan pekerjaan untuk pengurus LSD Anjani.

Mereka bisa mengumpulkan sampah plastik setiap bulannya

sampai dengan 5 ton. TPS 3R Desa Anjani juga dalam waktu dekat akan menjalin kerjasama dengan Plastik Bank Indonesia (PBI). Kerjasama tersebut menjadikan TPS 3R Desa Anjani yang dikelola oleh LSD Anjani sebagai proyek percontohan upaya mengurangi sampah plastik yang mengalir ke laut di tingkat desa.

C. Perubahan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Stakeholder Terkait

Di samping perubahan kelompok dan individu yang tergabung dalam LSD, keberadaan lembaga ini juga membawa perubahan bagi masyarakat di sekitarnya. Begitu juga dengan pemerintah desa dan stakeholder di tingkat desa. Hal itu nampak dari bagaimana pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam meningkatkan perannya dalam penanganan masalah pekerja migran di tingkat desa.

Potret perubahan dari peningkatan kapasitas program tercermin dari suksesnya LSD dalam memberdayakan masyarakat agar aktif dalam penyelesaian masalah pekerja migran. LSD telah mampu menciptakan atmosfer yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanganan isu pekerja migran.

Melalui berbagai program, LSD telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran. Ini memberikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi hingga inisiatif konkret untuk menyelesaikan masalah. Dengan pemberdayaan ini, masyarakat merasa memiliki peran yang penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran.

Keberhasilan LSD dalam memberdayakan masyarakat juga tercermin dari adanya peningkatan partisipasi dalam pembuatan

kebijakan dan implementasi program yang lebih efektif. LSD berhasil membina kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan lembaga pemerintahan setempat, menciptakan sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran.

Peningkatan kapasitas program ini bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran, membangun keterampilan, dan mendorong aksi nyata dalam penyelesaian masalah. Keberhasilan dalam hal ini menunjukkan bahwa LSD telah berhasil memberdayakan masyarakat, menjadikan mereka agen perubahan yang aktif dalam menanggapi masalah pekerja migran.

Setiap desa dampingan menunjukkan pencapaian yang unik, salah satunya adalah Desa Anjani di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Desa Anjani telah dianugerahi predikat sebagai Desa Migran Produktif oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Bahkan perayaan Hari Migran Internasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja memilih Desa Anjani sebagai lokasi kegiatan, hal ini tidak lain karena peran aktif LSD Anjani dalam menangani dan mendampingi kasus PMI sejak awal.

Di tahun 2023, pemerintah desa Anjani dianugerahi label Paralegal Justice Award oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas keterlibatan kepala desa dalam memastikan kedamaian di tingkat desa dengan mengurangi konflik di antara warga melalui musyawarah sebagai prinsip utama. Penghargaan tersebut terutama mengakui keterlibatan Muhammad Said dalam menangani kasus PMI melalui mediasi yang difasilitasi di tingkat desa.

Sejak pelaksanaan program ADBMI dan AWO International di

lima desa dampingan, telah banyak memberikan manfaat dan pencapaian yang signifikan, menjadikan desa-desa tersebut memiliki posisi strategis di pemerintah daerah hingga tingkat pusat. Posisi ini diakui setelah melalui proses panjang dalam menangani dan mendampingi PMI.

Salah satu prestasi yang membanggakan adalah status Desa Program ADBMI dan AWO International sebagai model dalam pendataan jumlah PMI di tingkat desa. Pendataan migrasi yang dilakukan setiap tiga tahun mendapatkan apresiasi tinggi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset Nasional (BRIN).

Desa Anjani menjadi contoh bagi BPS dan BRIN dalam pelaksanaan pendataan migrasi internasional di tingkat desa untuk mengetahui jumlah warga desa yang bekerja di luar negeri. Rudolf Yuniarto, salah satu peneliti Madya BRIN, memberikan apresiasi luar biasa kepada Desa Anjani yang memulai pendataan jumlah migran jauh sebelumnya. Ini menjadi pencapaian luar biasa, karena Desa Anjani telah menjadi rujukan nasional atas program yang digulirkan oleh ADBMI dan AWO International di tingkat desa.

KEMENANGAN-KEMENANGAN ADVOKASI



PETA JALAN: Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menerima buku panduan perlindungan inklusif bagi komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disusun Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lotim di ruangan kerja Bupati Lotim.

UPAYA DALAM menangani masalah pekerja migran telah melibatkan serangkaian strategi, di antaranya adalah upaya yang dilakukan oleh ADBMI bersama LSD dalam mengadvokasi kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten. Keterlibatan aktif mereka dalam mengusulkan kebijakan yang progresif dan inklusif

telah menjadi salah satu langkah penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran.

Keterlibatan aktif dari Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Pemerintah Desa dalam upaya advokasi telah menghasilkan pencapaian yang patut diakui, terbukti dengan meraih penghargaan karena peran serta mereka dalam program perlindungan pekerja migran. LSD, sebagai motor penggerak di tingkat desa, telah menjadi wadah bagi aspirasi warga desa dan para pekerja migran. LSD berhasil memfasilitasi dialog yang inklusif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja migran itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah desa.

Kemenangan advokasi yang dicapai oleh ADBMI bersama LSD di tingkat desa hingga kabupaten memperlihatkan bahwa upaya bersama dalam mendesak pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah pekerja migran telah membuahkan hasil yang positif. Penerimaan penghargaan bagi LSD dan Pemerintah Desa sebagai pengakuan atas keterlibatan mereka dalam program perlindungan pekerja migran merupakan bukti konkret akan kontribusi nyata mereka dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja migran.

Kini, tantangan berikutnya adalah mempertahankan momen positif ini dan mengembangkan dampak positif dari keberhasilan advokasi ini ke tingkat yang lebih luas. Perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan untuk mendorong implementasi kebijakan yang telah diadvokasi dan meningkatkan kapasitas serta partisipasi lebih banyak pemangku kepentingan untuk bersuara dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Kolaborasi yang berkelanjutan antara ADBMI, LSD, Pemerintah Desa, dan berbagai pihak terkait lainnya akan menjadi kunci dalam menangani masalah kompleks ini secara berkelanjutan.

—

Wujud nyata dari perubahan-perubahan yang terjadi atas intervensi program ADBMI dan AWO Internasional baik secara individu, kelompok, dan juga di tengah masyarakat merupakan bagian dari serangkaian kerja-kerja advokasi yang berhasil dilakukan.

Kerja panjang advokasi LSD di lima desa terwujud dalam serangkaian kemenangan-kemenangan advokasi yang diperjuangkan oleh para anggota LSD. Hal itu melingkupi kemenangan advokasi di level desa dan kabupaten.

A. Kemenangan Advokasi di Level Desa

Dalam upaya mendorong perlindungan dan pemberdayaan PMI di desa, LSD berupaya mendorong kebijakan baru di tingkat desa yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan PMI beserta keluarganya. Hal ini dilakukan dengan memacu pembentukan payung hukum yang menasar perlindungan dan pemberdayaan PMI di tingkat desa, seperti Peraturan Desa (Perdes) perlindungan pekerja migran dan keluarganya.

Kebijakan semacam ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menurunkan angka PMI yang tidak terdokumentasi dan meningkatkan layanan migrasi yang lebih aman.

Adanya payung hukum ini juga berdampak pada sektor penganggaran. Pemerintah desa diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk memfasilitasi layanan bagi PMI. Terutama yang bersumber dari dana desa (DD).

B. Kemenangan Advokasi di Level Kabupaten

Tidak hanya di tingkatan desa, upaya memperjuangkan perlindungan pekerja migran dan keluarganya juga dilakukan dengan mendorong kebijakan di tingkat kabupaten. LSD bersama ADBMI yang didukung AWO Internasional telah berhasil mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).



Direktur ADBMI Roma Hidayat (tengah) bersama Kadis P3AKB Lotim drg Asrul Sani bersama jajaran dan akademisi pemerhati perempuan dan anak berfoto bersama usai membahas pembentukan UPTD PPA.



Ketua DPRD Lotim Murnan (kiri) memberi keterangan mengenai Raperda inisiatif DPRD Lotim tentang perlindungan buruh migran pada acara seminar perlindungan inklusif untuk para pekerja migran.

Selain itu, LSD juga mendorong dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.

Tak cukup dengan itu, saat ini LSD bersama ADBMI dan AWO Internasional juga mendorong terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lombok Timur. Hal itu dirasa penting sebab keberadaan UPTD PPA yang masih berada di bawah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur saja tidak cukup.

POTRET KEBERHASILAN ADVOKASI

CERITA-CERITA ANGGOTA LSD dalam mendampingi kasus pekerja migran tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemampuan mereka dalam mengadvokasi kasus PMI dan mendorong terlahirnya kebijakan perlindungan pekerja migran di tataran desa adalah satu dari sekian banyaknya pundi-pundi kebermanfaatan yang dihadirkan oleh LSD di lima desa program ADBMI dan AWO International sejak 2018.

Cerita-cerita pendampingan mereka (LSD) acap kali luput dari lensa kamera, luput dari pemberitaan dan bahkan luput dari sebuah apresiasi. Namun begitu, kerja-kerja kebaikan dan kebermanfaatan tidak hilang meskipun tanpa tanda bintang jasa dari pemerintah.

Banyak kasus dan cerita pendampingan PMI yang dilakukan oleh LSD di lima desa dampingan. Sejak tahun 2018 ada sekitar 137 kasus PMI yang diselesaikan kasusnya oleh LSD yang diisi oleh masyarakat desa setempat. Selain itu, banyak juga kasus-kasus PMI di luar desa program ADBMI dan AWO International yang bisa diselesaikan permasalahannya oleh LSD.

Dengan demikian, keberadaan LSD tidak hanya terbatas secara

teritorial kebermanfaatannya, namun juga secara sosial. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada LSDnya. Seakan-akan LSD tidak pernah hilang secara sosial. Mereka tetap berjalan meskipun dengan mesin dan roda-roda yang sudah berganti dan beralih fungsi.

Dari banyak cerita perjuangan dan keberhasilan advokasi yang dilakukan LSD di lima desa dampingan program ADBMI bersama AWO Internasional, kami akan menyuguhkan sebuah cerita keberhasilan advokasi yang digawangi Firman Siddik di LSD Anjani.

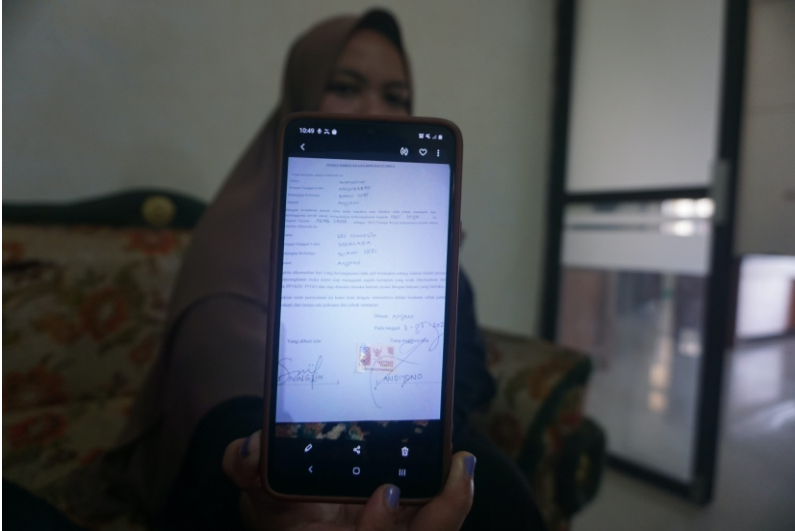
—

Kesaksian Sri Ningsih

Sri Ningsih, 30 tahun, warga Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tak akan melupakan jasa Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani bersama pemerintah desa Anjani yang telah menghindarkannya dari petaka buruk sebagai PMI ilegal. Bahkan mungkin menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Bersama suaminya Andiyono, 46 tahun, ibu tiga anak kelahiran tahun 1993 itu menceritakan bagaimana ia diselamatkan oleh LSD Anjani. Hal itu berawal saat ia merasa curiga dengan proses rekrutmen dirinya sebagai PMI. Di mana ia menemui banyak kejanggalan dalam setiap tahapan. Salah satunya adalah saat ia diminta untuk suntik KB.

Ningsih sama sekali tak pernah bekerja menjadi PMI ke luar negeri. Namun karena tuntutan ekonomi keluarga, sejak 2022 ia sudah berniat untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Pada Februari 2022, ia kemudian bertemu dengan salah



SURAT PALSU: Sri Ningsih, 30 Tahun, warga Desa Anjani, Kecamatan Suralaga menunjukkan salah satu surat pernyataan izin keluarga menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak dibuat sesuai prosedur. Ningsih merupakan satu dari 4 perempuan yang tidak jadi diberangkatkan secara ilegal oleh oknum penyalur PMI non prosedural dari Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga.

seorang petugas lapangan atau tekong penyalur yang menawarkan lowongan ke negara timur tengah. Penawaran tersebut diikat kuat dengan memberikan Ningsih uang sebanyak Rp 4 juta. Ya, bukannya mengeluarkan biaya, ia malah mendapatkan uang *panjar*.

Ia dipersiapkan berangkat bersama 6 orang lainnya yang berasal dari desa lain. Tujuh calon korban PMI ilegal tersebut tidak melalui persiapan keberangkatan prosedural. Di mana surat pernyataan izin keluarga tidak melalui pemerintah desa, tes kesehatan klinis atau medical *chek up* juga dilakukan di Lombok Tengah. Ningsih menjelaskan bagaimana paspor dan visa akan diurus setelah ia sampai di Jakarta.

Sebenarnya ia sendiri telah diberi tahu jika keberangkatnya ilegal. Namun hal itu akan berubah setelah di tempat bekerja nanti. Seperti

kata tekongnya, semua akan diurus belakangan agar bisa menjadi pekerja migran legal.

Di saat yang sama, suaminya Andiyono mengaku tidak mengetahui jika istrinya akan diberangkatkan secara non prosedural dan penuh kecurigaan seperti itu. Ia menjelaskan jika mengetahui kondisi seperti itu, tentu ia tak akan memberi restu.

Bersyukur, keresahan dan kecurigaan Ningsih pada keberangkatan ilegal itu sempat ia ungkapkan melalui media sosialnya saat berada di penampungan sebelum berangkat. Curhatan itu pun segera terbaca oleh Firman Siddik. Firman yang sudah terbiasa dengan kerja-kerja advokasi di LSD Anjani pun segera bertindak untuk membantu membatalkan keberangkatan Ningsih. Firman pun beraksi dengan melaporkan hal tersebut pada pemerintah desa. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan dukungan karena nantinya harus berurusan dengan oknum pekerja lapangan atau tenaga penyalur yang namanya sudah cukup tersohor di lingkup Kecamatan Suralaga.

Lalu pada Kamis malam 9 Maret 2023, LSD Anjani bersama Pemesdes Anjani menjemput warganya yang akan diberangkatkan menjadi PMI ilegal dengan tujuan negara Arab Saudi. Selain warganya, ternyata ditemukan tiga calon PMI ilegal perempuan lain di rumah oknum penyalur di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga. Penjemputan atau kegagalan keberangkatan tersebut dilakukan bersama tiga anggota Polsek Suralaga.

Menurut Firman, ada yang janggal saat calon PMI dimintai untuk suntik KB. Ia meyakini, ada permainan oknum penyalur yang merugikan masyarakat, khususnya di Kecamatan Suralaga yang menjadi salah satu kantong besar tenaga kerja luar negeri di Lombok Timur. Itulah mengapa ia tidak membutuhkan waktu lama untuk bertindak. Dan jika terlambat beberapa jam saja, Ningsih tentu sudah

sulit untuk diselamatkan.

Ningsih sendiri mengaku merasakan manfaat dari apa yang dilakukan LSD Anjani. Ia juga menceritakan bagaimana LSD Anjani tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga telah banyak membantu PMI dan keluarganya dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Tak hanya itu, ia juga merasa dibantu oleh LSD Anjani dan Pemdes Anjani dari teror oknum tenaga penyalur yang memintanya untuk mengembalikan uang Rp 4 juta yang sebelumnya telah ia gunakan karena kebutuhan ekonomi.

Sekretaris Desa Anjani Abdurrahman juga menceritakan peran serta LSD Anjani dalam membantu PMI dan keluarga di Desa Anjani selama ini. Sejak LSD Anjani berdiri pada 2018, Abdurrahman mencatat peran dan fungsi pemerintah desa dalam melindungi warganya berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dari beberapa penghargaan yang didapatkan. Juga bagaimana desanya menjadi proyek percontohan program perlindungan pekerja migran dari pemerintah pusat.

—

Cerita Sri Ningsih dan Firman Siddik bersama LSD Anjani tentunya tidak habis sampai di sana. Firman juga mencatat sekian banyak langkah advokasi yang dilakukan LSD Anjani dalam membantu warganya yang mengalami persoalan akibat belum sempurnanya sistem perlindungan buruh migran di negeri ini.

Tidak hanya mengadvokasi warga desanya, LSD Anjani juga bahkan mengadvokasi warga di luar desanya seperti membantu kepulauan Siti Linda Ekayanti yang diduga menjadi korban penyiksaan majikannya saat bekerja menjadi PRT di Arab Saudi.

Firman mencatat bagaimana Siti Linda Ekayanti dipulangkan dalam keadaan tidak manusiawi, buta, dan lupa ingatan. Ia hanya

ingat balok kayu dan botol kaca yang digunakan oleh sang majikan secara sadis menyiksanya secara membabi buta. Siti Linda bahkan tak ingat siapa nama anak-anaknya yang masih belia.

Selain membantu mengadvokasi kasusnya, beberapa kali LSD Anjani membantu pengobatannya ke rumah sakit. Sampai akhirnya perempuan 27 tahun itu meninggal dunia tiga bulan setelah dipulangkan dari Arab Saudi.

Selain itu, Firman juga mengingat dengan jelas bagaimana LSD Anjani membantu kepulangan jenazah warga Desa Anjani yang menjadi korban kecelakaan kapal yang mengangkut PMI Lombok secara ilegal. Serentetan kerja advokasi di lingkup desa itu ia catat baik dan pada sebuah kesempatan ia sampaikan saat mengikuti ajang Pemuda Pelopor 2022. Ajang tahunan itu diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

—

Selain cerita Firman di LSD Anjani, terdapat juga banyak cerita advokasi lainnya di Pringgasela Timur, Ketapang Raya, Suradadi, dan Wanasaba. Semua itu terekam baik dalam catatan-catatan anggota LSD. Ada Linda Alfiana di Pringgasela Timur, Safiurrahman di Ketapang Raya, Asniati di Suradadi, dan Rahmatullah di Desa Wanasaba.

FROM MINUS TO PLUS

Melalui buku ini, pelaku pemberdayaan dapat mempelajari dinamika pembentukan struktur sosial di lokasi kerja yang kompleks. Menemukan potensi kader, mengatasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Buku ini juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam komunitas yang tradisional berbasis patriarki dan tantangan dalam kebijakan yang seringkali tidak seimbang. Pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan dapat mempelajari bagaimana membangun kepercayaan diri para pengurus LSD yang sebelumnya merupakan korban dan kurang akrab dengan literasi, kini berbicara lantang dan yakin membangun kemitraan dengan pihak eksternal.



International



02-3080-8304-190